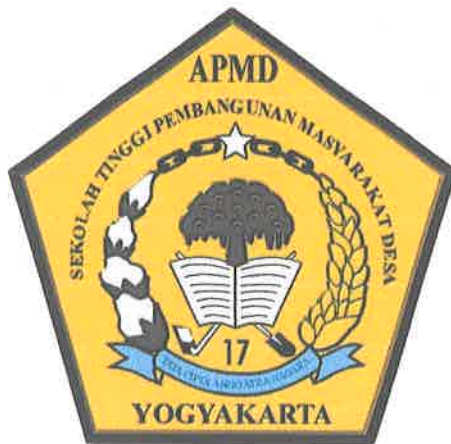


PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**(Penelitian Di Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon
Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH: SAMUEL ARIFANDRI SALEM

20520054

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



(PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

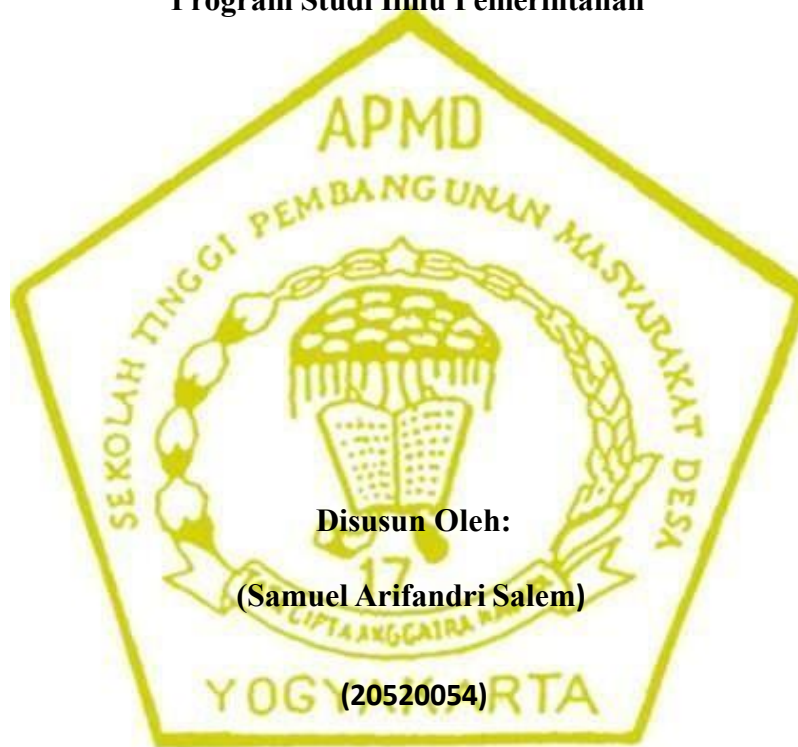
**(Penelitian Di Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon
Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat:

Tanggal : 21, Februari 2025

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si



Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



Penguji Samping I

Minardi. S.IP., M. Sc



Penguji Samping I



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Arifandri Salem

Nim :20520054

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**(PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Penelitian Di Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



karta, 12 Maret 2025

Samuel Arifandri Salem

20520045

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Samuel Arifandri Salem
NIM : 20520054
Telp : 081214302612
Email : samuelsalem47@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PEMERINTAH KALURAHAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Penelitian Di Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 22 April 2025
membuat pernyataan

Samuel Arifandri Salem
20520054



MOTTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.

(Matius 7: 7-8)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.”

(1 Korintus 10:13)

“Jika belum bisa tepat waktu, usahakanlah di waktu yang tepat”

(Samuel Arifandri Salem)

“Jangan lari, Menderitalah sampai kau sembuh”

(Samuel Arifandri Salem)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan berkarya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah membantu saya, membimbing dan selalu menjaga saya sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya.
2. Kepada kedua orang tua saya bapak Siprianus Mudin dan mama Hermelinda Setia. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi. Dan perjuangan serta doa-doa yang tidak pernah terlupakan untuk anak-anaknya yang menempuh pendidikan. Dengan doa dari Bapak dan Mama saya bisa menyelesaikan pendidikan saya.
3. Untuk kakak dan adik saya Imelda Nusriyati dan Ariyo Mudin yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya. Terima kasih juga untuk semua keluarga yang telah memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan dorongan agar saya bisa menjadi anak yang lebih baik.
4. Terima kasih untuk semua teman yang mungkin belum sempat memberikan kontribusi signifikan dalam tugas akhir saya, namun mereka selalu ada

untuk menjadi teman cerita, berkeluh kesah dan bertukar pikiran. Terima kasih juga karena sudah menjadi penghibur di kala rasa lelah datang.

5. Terima kasih untuk para dosen, pegawai, dan teman-teman di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada saya, yang telah membantu saya dan memberikan support kepada saya.
6. Terima kasih kepada seluruh pihak kalurahan Timbulharjo dan padukuhan Tembi yang telah memberi ijin saya melakukan penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih untuk semua orang yang telah membantu saya selama kurang lebih 5 tahun di kota Jogja, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Penelitian Di Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**, sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan izin dalam proses penelitian.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Samuel Arifandri Salem

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	III
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
INTISARI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Fokus penelitian	5
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Review litteratur.....	6
G. Kerangka konseptual	14
a. Pemerintah	14
b. Pemberdayaan.....	39
c. Masyarakat.....	64
d. Desa	78
H. Metode penelitian.....	93
a. Jenis penelitian.....	93
b. Subjek penelitian.....	94
c. Objek penelitian.....	94
d. Lokasi penelitian.....	94
e. Teknik pengumpulan data	95
f. Teknik analisis data	96
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN TIMBULHARJO ..	99
A. Pemberdayaan masyarakat di kalurahan Timbulharjo	99
1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Tembi.....	99
2. Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat	101
3. Program pemberdayaan yang dilakukan	103
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA TEMBI.....	106

A. Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi	106
B. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo	118
BAB IV PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN.....	134
PANDUAN WAWANCARA	134
RINGKASAN DATA	136
DOKUMENTASI PENELITIAN	137
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM- KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021-2026.	139
PERKAL NO 7 TAHUN 2024 TENTANG APBKAL KALURAHAN TIMBULHARJO	142

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi dan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo

Pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata Tembi dilihat dari strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pengembangan desa wisata dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo. Strategi pemerintah kalurahan timbulharjo adalah strategi peningkatan keamanan, pelayanan ramah, serta promosi digital. Tembi dijadikan model pengembangan wisata bagi padukuhan lain dan menjadi bagian dari program Gabusan Manding Tembi (GMT) untuk memperkuat ekosistem wisata melalui keterlibatan masyarakat. Dan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat kalurahan Timbulharjo dalam pengembangan desa wisata adalah Pemerintah juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat, seperti pendirian pasar kuliner, penyewaan tanah desa untuk wisata, serta pengelolaan sampah. Selama pandemi, masyarakat didorong mengelola ternak lele dan produksi batik ecoprint sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas. Namun, dalam RPJMKAL, desa wisata bukan program prioritas, sehingga tidak ada alokasi dana khusus dalam APBKAL untuk pelaksanaannya.

KATA KUNCI: Strategi, Pemerintah kalurahan, Pemberdayaan, masyarakat, Desa

BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar belakang masalah

Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan potensi besar di bidang alam, budaya, sejarah, dan kuliner. Selain menyumbang retribusi dan pajak, pariwisata juga menciptakan lapangan kerja serta mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, yang meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor ini juga berdampak positif pada industri kreatif, perdagangan, dan layanan, serta membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang. Banyak desa menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi utama, didukung oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang memberikan otonomi desa dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan desa wisata harus dilaksanakan secara terencana agar tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan pariwisata dapat tercapai secara optimal. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk mendorong pengembangan potensi pariwisata dan juga diharapkan mampu menangani masalah yang ada di desa, seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu cara pemerintah desa dapat mengatasi masalah ini adalah dengan

menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Selain pemerintah desa, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata karena desa wisata diharapkan dapat memberikan peluang usaha dan akses kepada masyarakat lokal melalui dukungan pariwisata.

Melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Fokus pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dengan menciptakan dan mengubah pola perilaku masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial untuk memperbaiki keadaan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga menjadi strategi utama dalam konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting dan sentral dalam proses pembangunan.

Berbagai teori telah menjelaskan pemberdayaan masyarakat, contohnya adalah teori *top down* dan teori *bottom up*. Teori *top-down* dalam pemberdayaan masyarakat menekankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau institusi tanpa keterlibatan masyarakat, sehingga sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memiliki kelemahan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, resistensi terhadap perubahan, dan ketidaksesuaian dengan konteks lokal. Sebagai alternatif, teori *bottom-up* memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Namun, keberhasilannya bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam

pembangunan desa wisata, misalnya, hanya mereka yang aktif yang akan merasakan manfaatnya, sementara yang pasif tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Dari kedua teori yang telah dijelaskan di atas ada beberapa kendala sehingga belum bisa diterapkan secara maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat sangat dipentingkan karena merekalah yang menjadi subjek, masyarakat yang menjadi aktor utama dalam pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pemberdayaan karena mereka sendiri yang tahu keadaan di lingkungannya, apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan berbagai alasan sehingga nilai manfaat hanya didapat oleh beberapa individu dan komunitas yang berpartisipasi secara aktif.

Pemerintah dan masyarakat, sebagai pihak yang menerima dan berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan, harus bekerja sama. Masyarakat harus mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kepada pemerintah dan pemerintah diharapkan mau mendengar dan melakukan kebijakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu keterlibatan masyarakat dalam hal ini harus secara maksimal, semua elemen masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dari tahap awal tahap perencanaan sampai dalam tahap pelaksanaan, pemerintah diharapkan mampu mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara memberi ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan menjelaskan keuntungan apa saja yang diperoleh dan dapat membantu kehidupan masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang disebutkan di atas terjadi di desa wisata Tembi di kalurahan Timbulharjo. Desa wisata Tembi terkenal karena potensinya dan beberapa homestay yang menawarkan pengalaman menginap seperti di pedesan. Selain itu, desa wisata Tembi juga terkenal karena para pengrajinnya, banyak warga di sekitar desa wisata Tembi yang bekerja sebagai karyawan kerajinan, dan bahkan wisatawan yang datang ke desa wisata Tembi menikmati pengalaman menginap dan ikut merasakan membuat kerajinan tersebut. Kerajinan yang di hasilkan oleh para pengrajin ini adalah tas batik, aksesoris dan masih banyak lagi kerajinan lainnya. Namun, masyarakat di sekitar desa wisata Tembi tidak semuanya aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di atas, pasalnya di desa wisata Tembi terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat lokal dan pemberdayaannya dalam menyediakan produk desa wisata baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pembagian manfaat dengan pelaku wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan produk desa wisata dari aspek perencanaan sudah cukup baik walaupun belum terorganisir dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran masyarakat lokal dan perwakilannya yang tinggi, namun dalam proses pelaksanaannya masyarakat belum terlalu dilibatkan secara penuh. Oleh karena itu, dampaknya adalah pembagian manfaat yang hanya didapat oleh beberapa individu dan komunitas yang berpartisipasi secara aktif.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui perencanaan dan kebijakan, aksi sosial dan politik, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran. Di desa wisata Tembi, pemberdayaan yang telah dilakukan adalah melalui pendidikan,

namun belum maksimal karena dianggap monoton dan kurang bermanfaat. Sementara itu, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan belum diterapkan karena desa wisata Tembi bukan program khusus pemerintah Kalurahan Timbulharjo, sehingga distribusi kesejahteraan tidak merata. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik juga masih minim, terbatas pada promosi di website dan kunjungan dinas tanpa ada gerakan nyata untuk pengembangan desa wisata.

B. Rumusan masalah

Bagaimana strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa wisata?

C. Fokus penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, peneliti akan menetapkan jangkauan dan ruang lingkup penelitian sesuai dengan judul yang diangkat, pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan itu dilihat dari:

1. Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi.
2. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menggambarkan strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi.
2. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo.

E. Manfaat penelitian

1. Supaya para pembaca dapat mengetahui dan memahami strategi yang digunakan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata Tembi.
2. Supaya para pembaca mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo.

F. Review litteratur

Pertama, skripsi dengan judul strategi pengembangan desa wisata melalui model pemberdayaan masyarakat di desa Serang kecamatan Karangreja kabupaten Purbalingga yang ditulis oleh Ika Agustin tahun 2020, inti pembahasan skripsi ini adalah strategi yang digunakan oleh desa Serang untuk mengembangkan desa wisatanya seperti meningkatkan atraksi wisata, mempromosikan desa wisata, menyediakan akomodasi, melakukan analisis kelembagaan, dan membangun fasilitas umum, selain itu desa Serang juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tiga tahap yaitu penyadaran,

pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh BUMDes hingga Desa Serang ditetapkan sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan oleh Disnaker dan Disporapar terkait manajemen pariwisata dan keterampilan. Pendayaan dilakukan melalui pemberian modal untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Kedua, jurnal dengan judul strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal candi plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di desa bugisan kecamatan Prambanan kabupaten Klaten, *lifelong education journal* Vol. 1, No.1, Bulan April, 2022. Yang ditulis oleh Fitra ayuningtyas hidayatullah dan Tri sumina. Pokok inti jurnal ini adalah tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Wisata Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi untuk promosi, dengan dukungan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung utama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Risma, Widy Dwi. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis." (2021), Inti

pembahasan skripsi tersebut adalah strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan program pemberdayaan, yang cenderung bersifat *top-down* dan kurang melibatkan masyarakat. Hambatan yang dihadapi termasuk kemampuan aparatur desa yang terbatas, kurangnya waktu, dan rendahnya kesiapan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kemampuan aparatur, penyusunan ulang agenda kegiatan, dan kerja sama dengan pihak lain. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok kurang beruntung.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anita, Devi. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan." Jurnal Ilmiah Pendidikan *Scholastic* 4.2 (2020): 29-33. Yang membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan pedesaan. Jurnal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah lokal dan masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor kunci untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat meliputi pendanaan yang memadai, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti perlunya pendekatan dari bawah ke atas dalam upaya pemberdayaan, serta pentingnya kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan pengembangan kapasitas lokal untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Surahman, Susilo, dan Muthia Rahman Nayla. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Baturetno Bantul Melalui Pendidikan Non Formal." *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 3.1 (2022): 78-86. Jurnal ini membahas strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Baturetno, Bantul, melalui pendidikan non-formal. Penelitian ini mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Keberhasilan program bergantung pada kesadaran, kerjasama, dan komunikasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan infrastruktur desa. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai proses yang melibatkan identifikasi potensi dan kebutuhan lokal serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi.

Keenam, Setiadi, Muhammad Bagus, and Galih Wahyu Pradana. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)." *Publika* (2022): 881-894.. Penelitian ini menyoroti upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, terutama yang mengalami kemiskinan, dengan menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata, yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga melalui prinsip-prinsip seperti kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan kemiskinan. Selain itu, jurnal ini juga membahas proses

pemberdayaan yang melibatkan dukungan dari pemerintah dan pengelolaan sumber daya lokal untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Ketujuh, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di wisata Kampoeng Purba kelurahan Brangkal, Gemolong, Sragen. Jurnal Abdimas Indonesia Vol 2, No 1, Tahun 2022. Jurnal ini ditulis oleh Tegar Pangestu yang menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Kampoeng Purba, Kelurahan Brangkal, Gemolong, Sragen. Jurnal ini menjelaskan dampak pandemi Covid-19 yang meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut dan bagaimana program Pejuang Muda yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial RI melibatkan mahasiswa dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menganalisis potensi dan masalah menggunakan metode SMART. Kegiatan seperti observasi, wawancara, dan diskusi dilakukan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Hasilnya, fasilitas dan sumber daya manusia di Kampoeng Purba ditingkatkan, serta branding wisata Pasar Budaya dilakukan melalui media sosial. Program ini berkelanjutan, berfokus pada dampak sosial-ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menjadi mandiri dan inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada.

Kedelapan, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal pada desa wisata “kampung Kokolaka” kelurahan Jatirejo kota Semarang, jurnal

Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya yang ditulis oleh Diva Pramesti Putri dan Tri Suminar Volume 3, Nomor 2, Juni 2023. Inti dari penjelasan jurnal ini adalah tentang program pemberdayaan masyarakat di Kampung Kokolaka, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi lokal melalui berbagai pengembangan dan inovasi. Proses pemberdayaan meliputi tahapan penyadaran, transformasi kemampuan, dan pengayaan intelektual, dengan dukungan dari pemerintah desa dan CSR perusahaan. Meskipun terdapat dampak positif terhadap kesejahteraan lokal, terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran, komitmen, dan semangat masyarakat yang tidak konsisten. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kesadaran dan perbaikan sarana prasarana.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Istiyanti, Dyah. "Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening." Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat 2.1 (2020): 53-62. Jurnal ini membahas tentang Inti pembahasan jurnal ini adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Sukawening melalui pengembangan desa wisata, yang melibatkan peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Jurnal ini menyoroti potensi pariwisata pedesaan, pentingnya budaya lokal dan sumber daya alam, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata seperti budidaya kelinci, penanaman edamame, dan kegiatan budaya yang dikelola oleh organisasi lokal. Proses pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan, dengan fokus pada sosialisasi, strategi pemasaran, dan pelatihan.

Kesepuluh, Hardiyanti, Kiki, Hartuti Purnaweni, and Sundarso Sundarso. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Balkondes Kabupaten Magelang." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 1.2 (2020): 83-93. Inti pembahasan jurnal tersebut adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di 20 Balkondes (pusat ekonomi desa) di Kabupaten Magelang, Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal melalui pengembangan pariwisata. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tahap pemberdayaan: kesadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Meskipun Balkondes memiliki potensi, tantangan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan pendekatan top-down menghambat keberhasilan. Jurnal ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan strategi bottom-up untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan inisiatif Balkondes.

Kesebelas, skripsi Dangu, Monika Wuaka. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi*. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, 2023. Skripsi ini membahas bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tembi. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencandra mengenai situasi atau kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga memperoleh gambaran yang jelas dengan metode

pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil dari penelitian ini adalah Desa Wisata Tembi telah menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa wisata melalui lima strategi *community enterprises* yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan, membantu mengembangkan teknologi lokal, menciptakan sarana untuk latihan, menciptakan peluang kerja, dan memperkuat ekonomi pedesaan yang masing-masing terdiri atas beberapa tahapan seperti tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Hal ini memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat Desa Wisata Tembi dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari kesepuluh jurnal yang telah dipilih dan dijadikan rujukan, terdapat perbedaan dan persamaan atau kaitan dengan jurnal yang akan dibuat oleh penulis, persamaannya di antaranya adalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang strategi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, selain itu terdapat beberapa hambatan yang di alami dalam pemberdayaan masyarakat ini, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada dua fokus yaitu strategi pemerintah kalurahan

Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo.

G. Kerangka konseptual

a. Pemerintah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah diartikan sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menteri yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah, dalam konteks ini, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara lebih luas, pengertian pemerintah mencakup semua organ negara yang berfungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR memiliki peran legislatif yang penting, sementara eksekutif melibatkan Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Pada dasarnya, pemerintah merupakan sekelompok individu atau lembaga yang diberi wewenang dan mandat oleh negara untuk menjalankan kekuasaan yang sah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai keputusan yang diambil untuk

kepentingan rakyat. Melalui kebijakan- kebijakan yang diambil, pemerintah bertugas melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara yang sah dan terstruktur, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dalam konteks pemerintahan desa, Pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai struktur pemerintahan di tingkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pemerintah diartikan sebagai Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa yang memimpin serta perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin dan perangkat desa yang melaksanakan fungsi-fungsi administratif serta pembangunan di tingkat desa. Pasal 26 Ayat (1) UU Desa lebih lanjut menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi berbagai tugas, antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Peran Kepala Desa ini sangat vital karena mereka bertanggung jawab atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan yang lebih luas, pemerintah dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di berbagai tingkatan, baik itu negara, negara bagian, atau negara kota. Pengertian ini sesuai dengan definisi yang diajukan oleh Sedarmayanti (2004:35), yang menyatakan bahwa pemerintah atau “government” merupakan lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, istilah pemerintahan atau “*governance*” merujuk pada tindakan atau proses dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, termasuk dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan hubungan antar berbagai pihak dalam negara. Pemerintahan ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan memajukan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara.

Pemerintah merupakan sebuah gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial ini muncul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok dalam suatu sistem sosial. Pemerintah, sebagai bagian integral dari masyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan antar elemen-elemen tersebut. Ia merupakan fenomena yang ada dan terjadi dalam sebuah masyarakat pada suatu waktu tertentu, dan

menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial. Gejala ini, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1997:6), menunjukkan bahwa pemerintahan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan suatu proses yang berkembang seiring berjalannya waktu dalam konteks hubungan sosial antar manusia dan kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama dan mengatur hubungan sosial di antara individu dan kelompok dalam suatu negara. Dalam pandangan yang lebih formal, Napitupulu (2012:9) memberikan pengertian bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara.

Lembaga pemerintahan ini memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan, serta membuat keputusan- keputusan yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya sekadar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam membentuk dan menjaga kestabilan suatu negara. Di sisi lain, pemerintahan dalam pengertian yang lebih luas dapat dipahami sebagai proses yang berkesinambungan dalam mengatur dan mengelola kekuasaan negara, di mana kegiatan tersebut melibatkan berbagai lembaga dan pejabat yang bertanggung

jawab atas terlaksananya berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintahan, dalam hal ini, merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan yang berfokus pada pengaturan sistem sosial dan politik.

Samuel E. Ward Finer, sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2003:135), mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki empat komponen penting dalam pelaksanaannya. Pertama, pemerintah harus memiliki kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan (proses), yang tidak berhenti pada satu titik saja, tetapi berjalan dalam suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan terstruktur. Kedua, pemerintah perlu memiliki wilayah negara tempat kegiatan tersebut dilaksanakan (state). Tanpa adanya wilayah atau teritori yang jelas, pemerintahan tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, pemerintah harus memiliki pejabat yang memerintah atau yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan (the duty). Pejabat-pejabat ini adalah mereka yang diangkat melalui mekanisme tertentu untuk memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Keempat, pemerintah harus memiliki cara, metode, dan sistem (manner, method, and system) dalam mengelola masyarakatnya. Ini berarti bahwa pemerintah perlu memiliki pendekatan yang jelas dalam melaksanakan kebijakan, yang

mencakup penggunaan metode tertentu, penerapan sistem pemerintahan yang tepat, dan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, proses pemerintahan yang baik harus memperhatikan keempat komponen ini secara bersamaan agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Tujuan utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menciptakan dan menjaga sistem ketertiban dalam masyarakat, di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan seimbang dan teratur. Ketertiban ini penting agar masyarakat dapat hidup dengan damai, tanpa adanya gangguan atau ketegangan yang merusak tatanan sosial. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan pelindung agar sistem sosial yang ada berjalan dengan lancar, memberikan rasa aman kepada setiap individu, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah tidak ada untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk melayani masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid dalam Muhadam Labolo (2011:35), tujuan lain dari pemerintahan adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.

Pemerintah harus menciptakan peluang yang dapat mendukung perkembangan individu, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial lainnya. Dengan adanya kondisi yang kondusif dan mendukung perkembangan ini, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bersama. Oleh karena itu, tugas pemerintahan bukan hanya terbatas pada pelaksanaan hukum dan kebijakan, tetapi juga harus melibatkan upaya untuk menciptakan iklim yang mendukung inovasi, pertumbuhan, dan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks ini, pemerintahan tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga harus bertindak sebagai fasilitator yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang, berkreasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial dan memfasilitasi perkembangan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sebuah negara yang demokratis dan berkeadilan. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pengaturan yang ketat untuk menciptakan stabilitas dan kebebasan yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi potensi diri mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik,

pemerintah akan dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Dengan demikian, pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan merata. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan potensi diri, sekaligus menjaga ketertiban dan stabilitas yang diperlukan agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan harmonis.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangannya mengenai pemerintahan dengan menyatakan bahwa "Pemerintahan diartikan sebagai proses pemerintahan atau keseluruhan sistem dan mekanisme pemerintahan." Dalam pengertian ini, beliau menjelaskan bahwa pemerintahan bukan hanya sekadar pelaksanaan atau aktivitas yang terjadi dalam institusi pemerintahan, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem yang ada untuk mendukung berjalannya pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan adalah suatu rangkaian proses yang mencakup pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian berbagai kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh berbagai institusi negara. Dari sudut pandang ini, kata "pemerintah" memiliki makna yang lebih sempit

jika dibandingkan dengan kata "pemerintahan". Pemerintah dalam konteks ini lebih merujuk pada institusi atau pelaksana kekuasaan eksekutif yang secara langsung bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kata "pemerintah" hanya merujuk pada institusi pelaksana atau eksekutif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok pemerintah dalam hal ini adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislatif, yang berisi kebijakan-kebijakan negara yang harus diterapkan di daerah, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal yang berlaku di tingkat pemerintahan daerah. Proses pelaksanaan ini, menurut Asshiddiqie, mencakup fungsi eksekutif yang secara historis memang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan yang mengatur berbagai hal yang bersifat normatif. Fungsi eksekutif ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran di lapangan.

Lebih lanjut, Asshiddiqie menjelaskan bahwa peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya berupa aturan yang bersifat umum atau general rules, tetapi juga dapat berbentuk

peraturan yang bersifat kebijakan atau *policy rules* (*beleid regels*). *General rules*, yang dapat berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang ditetapkan di tingkat pusat, adalah aturan yang mengatur berbagai hal secara umum dan berlaku untuk seluruh warga negara. Namun, dalam beberapa kasus, peraturan ini juga dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan yang hanya berlaku di wilayah tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Dengan demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berfungsi sebagai pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam negara.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat dipahami sebagai keseluruhan lingkungan jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi pemerintahan. Dalam konteks negara, pemerintahan bukan hanya merujuk pada satu lembaga atau institusi, tetapi lebih kepada keseluruhan alat kelengkapan negara yang ada dalam struktur organisasi negara itu sendiri. Bagir Manan, dalam bukunya *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (2001:100), menyebutkan bahwa pemerintahan dapat diartikan sebagai lingkungan jabatan yang terdiri dari berbagai macam jabatan yang memiliki wewenang tertentu. Di dalam suatu negara, jabatan-jabatan tersebut mencakup jabatan eksekutif, legislatif, serta jabatan-jabatan supra-struktural lainnya yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing

dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan struktur yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, dengan masing-masing lembaga atau institusi memiliki peran yang jelas sesuai dengan mandat dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ini, jabatan eksekutif, yang biasanya dijabat oleh Presiden atau kepala daerah serta para menteri, berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan negara dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, jabatan legislatif, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah, berperan dalam pembuatan undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, ada pula jabatan supra struktural yang memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian pemerintahan secara keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan keadilan.

Semua jabatan ini, baik eksekutif, legislatif, maupun supra-struktural, menciptakan lingkungan kerja yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, pemerintahan dalam pengertian ini mencakup seluruh komponen organisasi negara yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam

rangka menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Setiap jabatan yang ada dalam struktur pemerintahan memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, serta bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat dapat terjamin dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan politik semata, tetapi juga pada pembentukan sistem yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan untuk memastikan terciptanya negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah, sebagai pelaksana kekuasaan, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, peran eksekutif sebagai pelaksana kebijakan harus bersinergi dengan lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki tugas dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan bukan hanya sekadar sistem pelaksanaan peraturan, tetapi juga mencakup

keseluruhan elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan negara yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Pemerintah, dalam etimologi bahasa Latin, berasal dari kata *Gubernaculum*, yang artinya adalah kemudi. Istilah ini menggambarkan peran pemerintah sebagai pengendali atau pengarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya sebuah kapal yang membutuhkan kemudi untuk mengarahkan jalannya, suatu negara juga memerlukan pemerintah untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum administrasi, pengertian pemerintah digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara”. Hal ini berarti pemerintah mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pemerintah dapat dipahami melalui dua dimensi penting. Di satu pihak, pemerintah dapat dipandang dalam arti fungsi pemerintahan atau kegiatan pemerintahan, yang merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan kekuasaan dan kebijakan negara. Fungsi ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelenggaraan administrasi negara, pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Di pihak lain, pemerintah juga dapat dipahami dalam arti sebagai sebuah organisasi, yang merupakan kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan yang memiliki struktur, tugas, dan wewenang masing-masing. Dalam pengertian ini, pemerintah terdiri dari berbagai lembaga dan instansi yang memiliki peran penting dalam menjalankan sistem pemerintahan negara.

Salah satu hal yang penting untuk dipahami adalah kandungan dari "fungsi pemerintahan" itu sendiri. Fungsi pemerintahan mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa negara dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Fungsi ini dapat dipahami lebih lanjut dengan menempatkannya dalam hubungan dengan perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten melalui lembaga peradilan. Dalam pengertian ini, fungsi pemerintahan adalah segala macam kegiatan yang dilakukan oleh penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai kegiatan legislatif atau yudikatif. Kegiatan tersebut meliputi berbagai keputusan eksekutif yang bersifat operasional dan administratif, yang tidak hanya terfokus pada pembuatan hukum

(legislatif) atau pengawasan hukum (yudikatif), tetapi juga pada implementasi hukum dalam kehidupan nyata.

Philipus M. Hadjon dalam buku *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (1994:6) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan bisa dijelaskan secara negatif, yaitu sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh penguasa yang tidak termasuk dalam ranah legislatif atau yudikatif. Dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai pelaksana kekuasaan yang berhubungan dengan urusan administrasi, penyelenggaraan kebijakan, dan pengelolaan negara sehari-hari, yang berbeda dengan fungsi pembentukan undang-undang (legislatif) atau pengawasan dan penegakan hukum (yudikatif). Di sisi lain, menurut Montesquieu, dalam karya *Spirit of the Laws*, pemerintahan adalah suatu sistem yang mencakup seluruh lembaga yang ada dalam struktur negara, yang biasa dikenal dengan nama Trias Politika. Trias Politika ini terbagi dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu Legislatif (yang bertugas untuk membuat undang-undang), Eksekutif (yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang), dan Yudikatif (yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan undang-undang). Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga atau individu, dan untuk memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat berjalan dengan fungsinya masing-masing secara independen namun tetap

saling mengawasi. Pendapat ini dikuatkan oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (2004:35), yang menjelaskan bahwa pemerintahan tidak hanya terdiri dari satu lembaga atau satu bagian saja, melainkan merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemerintahan harus dapat menjalankan fungsinya dalam pengelolaan negara dengan cara yang transparan dan efisien, dengan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat bekerja sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurut Victor Situmorang, pengertian pemerintah dapat dilihat secara etimologis, di mana pemerintah diartikan sebagai kekuasaan atau otoritas yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memegang kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah adalah badan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur negara, serta membuat keputusan-keputusan penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dalam pengertian ini, pemerintah bukan hanya sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai badan pengambil keputusan tertinggi yang menentukan arah pembangunan dan kebijakan negara.

Menurut Suradinata, pemerintah dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini,

mencakup berbagai urusan publik, teritorial, dan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya negara, pengaturan administrasi pemerintahan, serta penciptaan dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin stabilitas sosial-politik di negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan kemajuan negara, dengan menjalankan berbagai fungsi administratif, legislatif, dan yudikatif yang saling terkait.

Secara keseluruhan, pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan negara. Baik dalam arti fungsi pemerintahan yang mencakup kegiatan operasional dan administratif, maupun dalam arti organisasi yang mencakup berbagai lembaga dan jabatan yang bekerja untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan efisien, adil, dan transparan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai pengendali dan pengatur kehidupan bernegara yang memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan negara.

Muhammad Rohidin Pranadjaja, dalam bukunya yang berjudul *“Hubungan antara Instansi Pemerintah”*, mengemukakan sebuah gagasan yang cukup mendalam mengenai pengertian

pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa istilah “pemerintah” berasal dari kata *perintah*, yang berarti suatu pernyataan atau kata-kata yang bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, pemerintah dapat dipahami sebagai individu, badan, atau aparat yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah dan memerintahkan orang lain untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu. Perintah yang diberikan oleh pemerintah ini bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh warga negara atau aparat lain yang terkait, demi kepentingan bersama dan tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, pemerintah berfungsi sebagai pemberi arahan dan pengambil keputusan yang berwenang dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola berbagai urusan negara. Hal ini disampaikan oleh Pranadjaja dalam bukunya *Hubungan antara Instansi Pemerintah* yang diterbitkan pada tahun 2003 (Pranadjaja, 2003: 24).

Selanjutnya, M. Kusnardi, dalam pandangannya mengenai pemerintah, menekankan gagasan bahwa pemerintah berperan sebagai alat yang dibentuk oleh negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan melindungi kepentingan warga negaranya. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kemajuan negara. Eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

oleh legislatif dan memastikan bahwa hukum dan peraturan diterapkan dengan adil, sementara legislatif memiliki tugas untuk merancang undang-undang yang menjadi dasar hukum negara. Adapun yudikatif, berfungsi mengawasi dan menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan objektif. Kusnardi menjelaskan bahwa pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi negara yang melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan negara, termasuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh W.S. Saire, yang mengutip dari Merriam, bahwa tujuan utama pemerintah adalah untuk menyediakan keamanan eksternal dan internal, menegakkan keadilan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kebebasan individu. Pemerintah harus memastikan bahwa negara dapat melindungi warganya dari ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk hidup dengan aman, sejahtera, dan memiliki kebebasan untuk berkembang sesuai dengan hak-hak dasar mereka. Keamanan eksternal berkaitan dengan perlindungan negara terhadap ancaman luar, sementara keamanan internal lebih berkaitan dengan pengelolaan ketertiban dalam negeri, termasuk penegakan hukum dan stabilitas sosial. Oleh

karena itu, pemerintah harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Wilson (1903:572), pengertian pemerintah tidak selalu terkait dengan organisasi angkatan bersenjata atau kekuasaan militer. Sebaliknya, pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian yang lebih luas, yang melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran bersama. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pengorganisasi yang menciptakan sistem dan struktur untuk mengelola urusan publik, serta memastikan bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat, dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan serta masalah yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Apter (1965:84) memberikan pandangannya bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan koersif atau memaksa, yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem yang ada. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang ditetapkan, dan bila perlu, menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

Pemerintah berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan kestabilan, serta sebagai lembaga yang dapat mengatasi konflik-konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat. Kekuasaan koersif ini sangat penting dalam menjaga agar masyarakat tetap berjalan sesuai dengan aturan dan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

R. Mac. Iver, seorang ahli teori politik, menjelaskan bahwa pemerintah adalah organisasi orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang bertugas untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang dalam masyarakat dapat diatur dengan baik, dan bahwa hak-hak serta kewajiban setiap individu dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Mac. Iver menekankan bahwa pengorganisasian yang baik dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan negara dan untuk menjaga agar setiap individu dalam masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera.

J. S. T. Simorangkir juga mengedepankan gagasan bahwa pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara bagian. Menurutnya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi negara, mulai dari penyelenggaraan administrasi negara, pembentukan undang-undang, hingga penegakan keadilan. Pemerintah harus memastikan

bahwa segala urusan negara berjalan dengan baik, dan bahwa hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Affan, dalam penjelasannya, menegaskan bahwa pemerintah adalah suatu kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh warga negara di wilayah negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam negara dapat terorganisir dengan baik, dan bahwa tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai melalui kebijakan yang tepat.

Mengikuti rumusan Finer (1974), istilah pemerintah dapat dibagi dalam empat pengertian. Pertama, pemerintah dapat mengacu pada proses memerintah, yaitu pelaksanaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Kedua, pemerintah juga dapat merujuk pada keberadaan proses itu sendiri, yakni adanya suatu tata aturan yang mengatur jalannya pemerintahan. Ketiga, pemerintah dapat berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, yang mencakup jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan. Terakhir, pemerintah dapat mengacu pada

bentuk, metode, atau sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu masyarakat, yang melibatkan struktur dan pengelolaan dinas pemerintahan serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Keempat pengertian ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya fungsi dan peran pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah lembaga atau sistem yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan administrasi negara, wilayah, atau komunitas secara keseluruhan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga sebagai pengorganisasi yang mengelola berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah memainkan peran sentral dalam menciptakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menunjang pembangunan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah memiliki kewenangan yang sangat luas, antara lain untuk membuat dan menegakkan kebijakan, hukum, serta peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Kewenangan ini diberikan oleh konstitusi dan sistem hukum yang berlaku, yang mengatur jalannya pemerintahan dan memberikan dasar yang sah bagi tindakan-tindakan pemerintah. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah bertugas untuk

menyusun kebijakan- kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Kebijakan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pembuatan undang-undang, pengaturan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan umum, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain membuat kebijakan, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan, pengawasan terhadap lembaga dan instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai penjaga dan pengawas terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan lain dalam masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum yang efektif dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan

lingkungan yang aman, stabil, dan bebas dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial. Keamanan ini mencakup tidak hanya keamanan fisik, tetapi juga keamanan sosial, ekonomi, dan politik, yang memungkinkan setiap warga negara dapat hidup dengan tenang, bekerja, belajar, dan berkembang tanpa rasa takut. Dalam mencapai tujuan ini, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti terorisme, kejahatan, dan ketegangan sosial.

Di samping itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan hak-hak dasar lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan layanan yang dapat mendukung kualitas hidup mereka. Melalui kebijakan publik yang tepat dan program-program pembangunan yang efektif, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan peluang yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam suatu negara sangatlah vital. Pemerintah tidak hanya bertugas sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga

sebagai pengarah dan penjaga terhadap keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, menjaga ketertiban, melindungi keamanan, serta memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Agar dapat menjalankan peran ini secara efektif, pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

b. Pemberdayaan

Mengutip dari buku *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan* yang ditulis oleh Eko Sudarmanto (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan atau kelompok masyarakat tertentu yang berada dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya, baik

itu ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bangkit dari kondisi ketidakberdayaan yang mereka alami dan memberikan mereka alat untuk memperbaiki nasibnya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, pemberdayaan bukan hanya sekadar bantuan sementara, melainkan sebuah proses panjang yang memungkinkan masyarakat untuk mengubah keadaan mereka secara mandiri.

Zubaedi (2013:162) menambahkan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai hasil dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Modal sosial yang dimaksud di sini adalah hubungan sosial, jaringan, serta norma dan nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Modal sosial ini berfungsi sebagai landasan untuk mendorong solidaritas dan kerja sama di antara anggota masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya bergantung pada potensi individu, tetapi juga pada kekuatan kolektif dalam sebuah komunitas yang saling mendukung. Menurut Wuradji, yang dikutip oleh Azis Muslim, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif,

partisipatif, dan berkesinambungan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani persoalan-persoalan dasar yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau akses terbatas terhadap layanan publik, serta untuk memperbaiki kondisi hidup mereka sesuai dengan harapan mereka. Penyadaran yang dimaksud dalam konteks pemberdayaan ini melibatkan proses belajar dan berbagi pengetahuan, serta membangun kesadaran akan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan solusi atas masalah yang ada.

Sementara itu, Djohani dalam Anwas menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak-pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang lebih kuat atau dominan, sehingga terjadi keseimbangan dalam hubungan sosial. Dalam hal ini, pemberdayaan berfokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, sehingga individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh kekuatan dan kontrol atas hidup mereka. Anwas lebih lanjut menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan ini identik dengan kemampuan individu atau kelompok untuk mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Dalam

konteks pemberdayaan, kekuasaan ini dipandang sebagai sesuatu yang harus didistribusikan secara lebih adil, sehingga setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Menurut Kesley dan Hearne dalam Mardikanto, falsafah pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Dalam hal ini, pemberdayaan bukan hanya sekadar memberikan bantuan atau fasilitas, tetapi juga berfokus pada pemberian kesempatan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Falsafah pemberdayaan ini menekankan pentingnya bekerja bersama masyarakat untuk membantu mereka agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini diungkapkan dengan konsep *"helping people to help themselves"*, yang berarti bahwa pemberdayaan harus mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, tidak bergantung pada bantuan luar, dan mampu mengatasi tantangan hidup mereka sendiri dengan sumber daya yang mereka miliki. Kartasasmita (1995:95) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, yang menurutnya memiliki dua aspek penting. Pertama, pemberdayaan adalah sarana untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kartasasmita berpendapat bahwa setiap individu dan

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan tersebut, seperti penyediaan pendidikan, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, pemberdayaan juga berfungsi untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Langkah-langkah nyata seperti memberikan pelatihan keterampilan, mengadakan program penguatan kapasitas, dan menyediakan prasarana yang mendukung sangat penting dalam memperkuat daya atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara fisik maupun sosial. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar memberikan bantuan, melainkan sebuah proses yang menyeluruh yang melibatkan penyadaran, penguatan kapasitas, pengelolaan kekuasaan, dan penciptaan iklim yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, adil, dan sejahtera, serta mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam kehidupan mereka.

Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang berkembang seiring dengan perubahan dinamika pemikiran masyarakat dan kebudayaan. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketidakberdayaan dan ketidakadilan yang mereka alami. Untuk memahami pemberdayaan dengan lebih mendalam, perlu dilihat latar belakang kontekstual yang melahirkan gagasan ini. Pemberdayaan menjadi suatu pendekatan yang relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketertinggalan, ketimpangan sosial, serta ketidakadilan yang umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat. Ketidakberdayaan ini sendiri sering kali dipicu oleh keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya, baik itu pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Sehingga, pemberdayaan masyarakat menjadi jalan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Soetomo (2011), pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan karena sumber masalah utama kemiskinan dan ketimpangan sosial terletak pada ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri.

Hamid (2018) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan kelompok masyarakat yang kurang

beruntung atau rentan dalam masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi masalah kemiskinan. Pemberdayaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka agar dapat bersaing secara kompetitif di masyarakat. Pemberdayaan ini juga mencakup upaya untuk memberi mereka kesempatan dan akses terhadap sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, baik dalam konteks individu, kelompok, maupun masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, pemberdayaan bisa dipandang sebagai suatu proses yang terencana yang bertujuan untuk memperbaharui dan meningkatkan potensi serta kegunaan objek yang diberdayakan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri mereka.

Sumardjo (dalam Endah, 2020) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan pengembangan kesempatan, motivasi, serta kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Pemberdayaan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan partisipasi tersebut, masyarakat tidak hanya dapat berkontribusi dalam proses pembangunan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mencapai kualitas hidup yang lebih

baik, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat mereka secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada butir 12 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kapabilitas, serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan aspek sosial, budaya, dan pemberdayaan intelektual masyarakat desa. Pemberdayaan ini bertujuan untuk membangkitkan seluruh potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Widjaja (dalam Endah, 2020) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan di desa adalah mengoptimalkan semua talenta yang ada di masyarakat desa, serta meningkatkan motivasi, inisiatif, dan kreativitas masyarakat untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di desa.

Pemberdayaan menurut para ahli seringkali dipahami sebagai suatu cara untuk mengarahkan masyarakat, organisasi, dan

komunitas agar mampu menguasai kehidupan mereka. Pemberdayaan berfokus pada pemberian kekuasaan atau kemampuan kepada kelompok- kelompok yang rentan dan lemah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kebebasan dalam arti yang lebih luas. Kebebasan ini tidak hanya berarti bebas untuk mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan, serta memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Suharto, 2010:210-224). Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya bertujuan untuk memberi kekuasaan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mereka bisa berdaya secara mandiri.

Suharto (2010:59-60) menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok- kelompok lemah dalam masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan atau mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai, yakni terciptanya masyarakat yang berdaya, yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, serta kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang diberdayakan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mampu menyampaikan aspirasi mereka, memiliki mata pencaharian yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka. Pemberdayaan pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan luar, tetapi mampu mengatasi tantangan yang ada dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu proses panjang yang tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan atau fasilitas, tetapi mencakup pembangunan kapasitas, penyadaran, pengelolaan kekuasaan, dan penciptaan peluang bagi masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, adil, dan sejahtera, serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan optimis.

Menurut Widjaja (2002:77), pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberian wewenang, pendelegasian wewenang, atau pemberian otonomi kepada jajaran yang berada di bawah struktur pemerintahan atau organisasi tertentu. Inti dari pemberdayaan ini adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dengan

pemberdayaan, diharapkan daerah atau komunitas menjadi semakin mampu dan mandiri. Maksudnya, masyarakat diberi kesempatan untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai kelompok sosial yang memiliki hak untuk mengelola kehidupannya sendiri, serta untuk membangun kesejahteraan mereka tanpa ketergantungan pada pihak luar. Pemberdayaan bukan sekadar memberi kuasa atau otonomi, tetapi juga memberi mereka kemampuan dan tanggung jawab untuk merancang dan mengelola kehidupan mereka dengan lebih baik.

Menurut Tri Winarni, pemberdayaan masyarakat melibatkan tiga aspek penting, yaitu pengembangan (enabling), penguatan potensi atau daya (empowering), dan penguatan kemandirian. Pengembangan (enabling) merujuk pada upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang dan memanfaatkan potensi yang ada pada mereka. Penguatan potensi atau daya (empowering) merupakan proses yang melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya dan memperjuangkan kepentingannya secara efektif. Sedangkan penguatan kemandirian adalah upaya untuk membuat masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, dengan memberi mereka alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mandiri.

Talcott Parsons, seorang ahli sosiologi, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses di mana individu menjadi cukup

kuat untuk dapat berpartisipasi dalam pengendalian atau pengaruh terhadap berbagai kejadian dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan, menurut Parsons, mencakup pemberian kekuasaan dan keterampilan kepada individu sehingga mereka dapat mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka dan kehidupan orang lain. Proses ini memberi individu kesempatan untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka.

Jim Ife, dalam pandangannya, menggambarkan pemberdayaan sebagai suatu cara untuk mempersiapkan individu atau kelompok dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Menurut Ife, pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara langsung, tetapi juga untuk memberi mereka kebebasan dan kontrol atas lingkungan mereka sendiri. Pemberdayaan ini mencakup pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta untuk mengubah situasi sosial dan ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan diartikan sebagai proses atau cara untuk membuat sesuatu menjadi berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan

sesuatu atau bertindak berdasarkan akal, ikhtiar, atau upaya. Pemberdayaan, dalam konteks ini, mencakup serangkaian tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan hidup, serta memberikan mereka alat dan kesempatan untuk mempengaruhi kondisi mereka.

Krisdyatmiko (dikutip oleh Irsyadi, 2008) mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberi "power" kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan atau marginal, yaitu mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam masyarakat. Power, dalam hal ini, merujuk pada kekuasaan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memengaruhi kehidupan mereka. Krisdyatmiko mengemukakan dua makna penting dari pemberdayaan: pertama, pemberdayaan merupakan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dan kekuatan dari pihak yang sudah memiliki kekuasaan (powerful) kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan (powerless). Kedua, pemberdayaan adalah proses untuk memotivasi individu atau kelompok masyarakat agar mereka memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri, serta mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Menurut World Bank, pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk menegosiasikan,

mengontrol, dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan, menurut pandangan ini, bertujuan untuk memberikan masyarakat miskin dan kelompok rentan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan, memanfaatkan peluang, dan mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan juga mencakup pemberian suara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pihak lain, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses yang kompleks yang tidak hanya mencakup pemberian kekuasaan atau sumber daya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui pemberdayaan, masyarakat diberi kapasitas untuk mengubah keadaan mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mengatasi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Pemberdayaan pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih

adil, setara, dan mandiri, yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Priyono dan Pranaka, pemberdayaan memiliki dua pengertian yang saling melengkapi. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, yang berarti pemberian kekuasaan, otoritas, atau kekuatan kepada pihak yang sebelumnya kurang berdaya atau belum memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka secara mandiri. Dengan pemberian kekuasaan ini, masyarakat yang sebelumnya berada dalam posisi terpinggirkan atau memiliki keterbatasan, diberikan kesempatan untuk memiliki kontrol lebih besar atas keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemaknaan kedua, *to give ability to or enable*, lebih menekankan pada pemberian kemampuan atau keberdayaan kepada individu atau kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, pemberdayaan bukan hanya tentang memberi kekuasaan, tetapi juga menyediakan kesempatan dan fasilitas agar pihak yang lebih lemah atau terpinggirkan bisa mendapatkan keterampilan, pengetahuan, serta kesempatan untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat miskin atau marginal, pemberdayaan berarti memberikan mereka alat atau sumber daya yang diperlukan

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Suryana, 2010).

Pemerintah melalui berbagai kebijakan juga mengakui pentingnya pemberdayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada pembentukan struktur sosial yang mendukung kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemberdayaan yang baik, masyarakat diharapkan mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan, yang bukan hanya menerima manfaat pembangunan tetapi juga berperan dalam menentukan arah pembangunan tersebut.

Menurut Daulay (2006), pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar atau kekuatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam proses pembangunan yang lebih

partisipatif dan inklusif. Dengan posisi tawar yang kuat, masyarakat tidak hanya menerima keputusan yang diambil oleh pihak lain, tetapi mereka turut serta dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hal ini akan menciptakan suatu sistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Slamet (2003) menambahkan bahwa pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri. Artinya, pemberdayaan tidak hanya mengenai pemberian bantuan atau fasilitas, tetapi lebih kepada menciptakan kesempatan dan kapasitas bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki kehidupannya. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang mereka miliki untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan inisiatif mereka sendiri. Pemberdayaan yang sukses akan membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar, melainkan mampu berdiri sendiri dalam mengelola kehidupannya dan meraih kesejahteraan.

Sumodiningrat (1999) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, sekaligus memperluas akses

kehidupan mereka agar dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan bukanlah suatu tindakan yang sekali selesai, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan, di mana masyarakat terus-menerus diberikan akses ke sumber daya yang dapat menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh kemandirian dalam jangka pendek, tetapi dapat mempertahankan dan mengembangkan kemandiriannya dalam jangka panjang.

Pemberdayaan, pada dasarnya, merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memperkuat atau mengoptimalkan potensi daya yang dimiliki oleh suatu kelompok sasaran, khususnya kelompok masyarakat yang kurang berdaya atau terpinggirkan. Salah satu tujuan utama pemberdayaan adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa masyarakat yang selama ini terpinggirkan atau terbelakang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengakses sumber daya yang ada, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka (Soleh, 2014:6).

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pembangunan yang melibatkan pemberian kekuasaan, kemampuan, dan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengelola kehidupan mereka dengan lebih baik. Pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan yang ada, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka, dan berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Pemberdayaan, yang diterjemahkan dari istilah *empowerment*, menurut Merriam-Webster dalam Oxford English Dictionary, mengandung dua pengertian utama yang saling melengkapi. Pertama, *to give ability or enable to*, yang berarti memberikan kecakapan atau kemampuan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat bertindak dengan lebih efektif dan mandiri. Dalam konteks ini,

pemberdayaan berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan seseorang atau kelompok untuk dapat mengelola kehidupannya dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Pemberdayaan ini tidak hanya berbicara tentang pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga mencakup pemberian kesempatan agar

individu atau kelompok dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, *to give power or authority to*, yang berarti memberikan kekuasaan atau otoritas kepada seseorang atau kelompok untuk mengendalikan dan mengarahkan keputusan- keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, pemberdayaan berfokus pada memberikan kontrol kepada individu atau kelompok terhadap proses-proses yang dapat mempengaruhi nasib dan masa depan mereka.

Carlzon dan Macauley, sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46), mengemukakan pandangan yang lebih dalam mengenai pemberdayaan, yaitu: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberikan orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.” Menurut pandangan ini, pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan kemampuan atau kekuasaan, tetapi juga memberikan kebebasan untuk bertindak secara mandiri. Ini mencakup kebebasan dalam berpikir, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dengan demikian, pemberdayaan juga melibatkan aspek kepercayaan terhadap kemampuan individu untuk memimpin dirinya sendiri dan membuat pilihan yang terbaik bagi dirinya, tanpa adanya batasan atau kontrol yang membatasi kreativitas dan inisiatif mereka.

Carver dan Clatterback (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan keberanian dan kesempatan kepada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemberdayaan lebih mengarah pada upaya untuk memberikan individu keberanian untuk mengambil inisiatif dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini mencerminkan pentingnya peran setiap individu dalam berkontribusi terhadap keberhasilan suatu organisasi atau masyarakat, dengan memberikan mereka kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan dan proses-proses penting lainnya.

Shardlow (1998:32) juga memberikan pandangan penting tentang pemberdayaan. Ia menyatakan bahwa, pada intinya, pemberdayaan berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan berupaya membentuk masa depan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Dalam pandangannya, pemberdayaan mencakup upaya untuk memperoleh kendali atas kehidupan sendiri, sehingga setiap individu atau kelompok dapat memutuskan arah hidupnya sendiri dan berusaha meraih masa depan yang lebih baik. Proses ini melibatkan pembelajaran dan pengembangan kemampuan yang memungkinkan

mereka untuk menavigasi tantangan kehidupan dan mewujudkan aspirasi mereka.

Menurut Parsons et al. (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengendalian atas, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan dalam konteks ini menekankan bahwa individu harus memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain di sekitar mereka. Dalam hal ini, pemberdayaan bukan hanya berfokus pada pencapaian tujuan pribadi, tetapi juga mencakup dampak sosial yang lebih luas, yaitu bagaimana individu dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kiesberg (1992:19) lebih lanjut menjelaskan bahwa pemberdayaan melibatkan individu untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka dan pemenuhan kebutuhan mereka, sebagian melalui pengembangan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan sosial dan dunia politik. Pemberdayaan ini berfokus pada penciptaan ruang bagi individu untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini juga mencakup proses belajar dan berkembang yang

memungkinkan mereka untuk memiliki suara dan berperan dalam menentukan arah kehidupan mereka.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, yang semakin efektif secara struktural di berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik dan ekonomi. Pranarka (1996:56) menegaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan meraih kesejahteraan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada pembentukan struktur sosial dan ekonomi yang mendukung perkembangan dan kesetaraan bagi semua pihak.

Definisi pemberdayaan, menurut Wasistiono, mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membebaskan individu dari kendali yang kaku. Ini bukan hanya tentang memberikan kebebasan secara fisik atau sekadar memberikan ruang untuk bertindak, tetapi lebih dalam dari itu, pemberdayaan juga berkaitan dengan memberikan seseorang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Dalam

pandangan ini, pemberdayaan mengarah pada pembebasan dari kekangan yang membatasi kreativitas dan potensi seseorang, serta memberikan mereka kekuatan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Proses ini menciptakan ruang bagi individu atau kelompok untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa adanya intervensi yang membatasi kebebasan berpikir dan bertindak mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan memberi kesempatan untuk membentuk dan mengelola kehidupan mereka sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang mereka anut.

Selain itu, Fahrudin (2012:96-97) juga mengemukakan pandangannya mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Proses pemberdayaan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang lebih rinci, yaitu melalui tiga aspek penting: (1) Enabling, yang berarti menciptakan kesempatan dan akses bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses sumber daya dan peluang yang ada; (2) Empowering, yang merupakan proses penguatan kapasitas individu atau kelompok masyarakat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan dalam mengambil keputusan. Dengan pemberian kekuatan ini, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk

mengubah nasib mereka; dan (3) Protecting, yang berarti memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan atau terpinggirkan, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan hak yang setara dan tanpa takut akan penindasan atau ketidakadilan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang melibatkan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan kemampuan atau sumber daya, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan individu atau kelompok tersebut dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam konteks ini, pemberdayaan mencakup penyediaan akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan, seperti pendidikan, keterampilan, serta informasi yang relevan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya proses yang bersifat teknis, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya, yang pada gilirannya dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola kehidupan mereka

dengan lebih baik, tanpa tergantung pada pihak lain yang lebih berkuasa.

c. Masyarakat

Menurut Karl Marx, masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah struktur yang terbentuk melalui hubungan produksi yang terjadi antara kelas sosial. Dalam pandangannya, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas yang memiliki alat produksi dan kelas pekerja yang menggantungkan hidupnya pada proses produksi. Dalam hubungan ini, kelas yang menguasai alat produksi mendominasi kelas pekerja. Oleh karena itu, masyarakat menurut Marx dipandang sebagai sistem yang tidak seimbang, di mana dominasi kelas yang lebih kuat cenderung mempertahankan struktur sosial yang ada, yang pada gilirannya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Masyarakat pun menjadi arena perjuangan kelas yang berlangsung secara terus-menerus, sampai akhirnya dapat terjadi perubahan yang menghasilkan masyarakat tanpa kelas (Marx, K. & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*).

Max Weber, dalam pandangannya, memberikan definisi masyarakat dengan penekanan pada hubungan sosial antara individu-individu dalam suatu kelompok. Menurut Weber,

masyarakat terbentuk dari interaksi sosial yang memiliki makna tertentu dan didasarkan pada tindakan sosial individu yang saling berhubungan. Dalam hal ini, Weber menyoroti pentingnya makna dan pemahaman yang dibawa oleh masing-masing individu dalam membentuk hubungan sosial tersebut. Artinya, masyarakat menurut Weber bukan sekadar kumpulan individu, melainkan kelompok yang terbentuk melalui kesadaran bersama yang menghasilkan pola-pola interaksi yang lebih kompleks, di mana individu dan kelompok tersebut saling memengaruhi dalam membentuk realitas sosial mereka (Weber, M. (1922). *Economy and Society*).

Di sisi lain, Emile Durkheim memandang masyarakat sebagai kenyataan objektif yang lebih besar dari individu-individu yang menyusunnya. Menurutnya, masyarakat memiliki struktur sosial yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam kelompoknya. Durkheim menekankan bahwa struktur sosial ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap individu, bahkan sampai pada titik di mana masyarakat bisa mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, masyarakat menurut Durkheim bukan hanya sekadar kumpulan individu, tetapi suatu entitas sosial yang terorganisir dan memiliki aturan yang mengikat anggotanya, yang pada gilirannya menciptakan keteraturan sosial (Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*).

Koentjaraningrat (2002:150) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Dalam pandangannya, interaksi sosial ini sangat penting dalam pembentukan masyarakat, karena melalui proses berinteraksi, manusia membentuk hubungan yang akhirnya melahirkan suatu struktur sosial. Interaksi ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Koentjaraningrat melihat masyarakat sebagai wadah di mana individu-individu berinteraksi, beradaptasi, dan membentuk nilai-nilai bersama yang menjadi landasan bagi kehidupan sosial mereka.

Gunsu Nurmansyah (2019:46) mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah manusia yang membentuk suatu kesatuan golongan yang memiliki hubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan kelompok manusia yang terorganisir berdasarkan kesamaan tujuan atau kepentingan bersama, yang kemudian membentuk identitas sosial yang khas. Masyarakat menjadi satu kesatuan sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya serta berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial melalui kerjasama dan solidaritas antarindividu.

Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm (1998) memberikan definisi masyarakat sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam

wilayah yang sama, relatif independen, dan memiliki budaya yang serupa. Masyarakat dalam pandangan ini mencakup unit sosial yang lebih besar daripada sekadar kelompok individu, karena melibatkan elemen-elemen seperti wilayah tempat tinggal bersama, serta kesamaan budaya yang menjadi landasan pembentukan ikatan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat dipandang sebagai entitas sosial yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu, tetapi juga dari bagaimana individu-individu tersebut saling terhubung melalui budaya dan tempat tinggal yang mereka bagi bersama.

John J. Macionis (1997) juga menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama. Dengan penekanan pada interaksi sosial dan budaya bersama, Macionis menyoroti bahwa hubungan antarindividu dalam masyarakat bukan hanya terbentuk dari kebetulan semata, tetapi sebagai akibat dari keterikatan dalam konteks wilayah yang mereka huni serta nilai-nilai budaya yang mereka anut. Masyarakat menurut Macionis adalah entitas sosial yang terus berkembang dan bertransformasi, menciptakan pola interaksi sosial yang semakin kompleks dan beragam seiring waktu.

Phil Astrid S. Susanto (1999:6) mendefinisikan masyarakat sebagai satuan sosial yang dibentuk oleh manusia dalam suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Masyarakat dalam definisi ini diartikan sebagai sistem sosial yang dibangun

berdasarkan interaksi manusia yang dilakukan secara terus-menerus, yang akhirnya menghasilkan pola-pola sosial yang stabil. Susanto menekankan bahwa keteraturan dalam masyarakat bukan terjadi begitu saja, melainkan melalui proses berulang yang melibatkan norma, nilai, dan perilaku yang diterima oleh masyarakat tersebut. Masyarakat dianggap sebagai struktur yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial.

Dannerius Sinaga (1988:143) memberikan pandangan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan. Masyarakat dalam definisi ini dipahami sebagai suatu kesatuan sosial yang terjadi karena adanya hubungan antara individu atau kelompok yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Interaksi ini muncul karena adanya kebutuhan bersama yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, Sinaga menambahkan bahwa masyarakat terbentuk atas dasar solidaritas yang berasal dari latar belakang sejarah, politik, atau kebudayaan yang sama, yang menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial antara anggota masyarakat tersebut. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hubungan antara individu-individu dalam suatu golongan atau kelompok kecil, yang saling bertalian satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dengan saling memengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan Shadily (1984:47), masyarakat terdiri dari golongan-golongan kecil yang memiliki hubungan sosial dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat dapat dilihat sebagai unit sosial yang memiliki interaksi yang kompleks antara anggotanya, yang dihasilkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi individu dalam kelompok tersebut. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dan pengaruh tertentu, yang berdampak pada interaksi dan hubungan sosial yang terbentuk di antara mereka. Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96) menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah dari hubungan sosial yang sangat luas, terdiri dari berbagai kolektif dan kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam setiap kelompok tersebut, terdapat subkelompok-subkelompok yang lebih kecil yang saling memengaruhi dan berinteraksi, yang membentuk dinamika sosial yang lebih besar. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai entitas yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait, di mana setiap elemen tersebut berperan penting dalam menciptakan struktur sosial yang lebih besar. Masyarakat, menurut Polak, terdiri dari banyak lapisan yang kompleks, dan setiap individu atau kelompok di dalamnya saling berhubungan untuk membentuk kehidupan sosial yang terus berkembang. Auguste Comte, seorang pemikir sosial

terkemuka, mengemukakan bahwa masyarakat berkembang secara evolutif melalui tiga tahap pemikiran yang berbeda, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positif. Dalam tahap teologis, masyarakat memahami segala sesuatu dengan pendekatan agama atau kepercayaan kepada kekuatan ilahi. Pada tahap metafisik, masyarakat berusaha memahami realitas dengan menggunakan konsep-konsep abstrak dan spekulatif. Sedangkan pada tahap positif, masyarakat mulai berfokus pada pendekatan ilmiah dan rasional untuk memahami dunia. Menurut Comte, perkembangan masyarakat menuju pemikiran positif ini menggambarkan kemajuan sosial yang berkelanjutan, di mana masyarakat semakin rasional dan ilmiah dalam menyelesaikan masalah dan membentuk struktur sosial yang lebih baik (Comte, A. (1830). *Cours de Philosophie Positive*). Proses evolusi ini menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi, yang berpengaruh besar pada perkembangan sosial secara keseluruhan. Soerjono Soekanto (2002) memberikan definisi masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adat atau norma tertentu yang bersifat kontinu, serta terikat oleh rasa identitas bersama. Masyarakat, menurut Soekanto, tidak hanya terbentuk oleh individu yang saling berinteraksi, tetapi juga oleh sistem adat dan norma yang mengikat mereka dalam hubungan sosial. Identitas bersama menjadi

unsur penting dalam menciptakan keterikatan sosial yang memungkinkan individu-individu dalam masyarakat untuk saling memahami dan bekerja sama. Dalam pandangannya, masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang, tetapi tetap terikat oleh norma-norma yang telah ada, yang menjadi pedoman dalam berinteraksi antar individu. Pitirim A. Sorokin (1937) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sistem hubungan sosial yang terus berubah, di mana setiap individu memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan dinamika kehidupan sosial. Sorokin melihat masyarakat sebagai entitas yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan dalam perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diterima oleh anggotanya. Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan proses yang terus berkembang, di mana setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah perkembangan sosial tersebut. Masyarakat adalah hasil dari hubungan-hubungan sosial yang kompleks antara individu dan kelompok yang berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun, pandangan tentang masyarakat tidak selalu memiliki definisi yang tunggal, karena sifat manusia yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Para ilmuwan sosiologi, seperti yang diungkapkan oleh Setiadi, Elly M. & Kolip (2013), memberikan berbagai definisi tentang masyarakat berdasarkan pendekatan dan sudut pandang yang

berbeda. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau konteks sosial tertentu, namun pada saat yang sama, pemahaman tentang masyarakat bisa sangat bergantung pada aspek yang ingin dilihat dan diteliti oleh para peneliti sosial. Hal ini menyebabkan para ilmuwan sosiologi memberikan definisi yang bervariasi dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang ada. Mahasin (1995) memberikan pandangan yang berbeda dengan memperkenalkan konsep masyarakat madani, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *civil society*. Kata *civil society* berasal dari bahasa Latin *civitas dei* yang berarti "kota Illahi", dan kata *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* ini kemudian berkembang menjadi kata *civilization* yang artinya peradaban. Oleh karena itu, *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yaitu masyarakat yang telah mencapai peradaban yang maju dan beradab. Masyarakat madani, dalam pandangan Mahasin, adalah masyarakat yang memiliki struktur sosial yang lebih maju, terorganisir, dan berkembang secara harmonis dengan adanya sistem hukum, norma, dan nilai yang jelas untuk memandu kehidupan bersama. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu menjaga keteraturan sosial, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh anggotanya.

Menurut Abdulsyani, istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* atau *masyaraka*. Kata *syaraka* sendiri berarti ikut serta atau berpartisipasi, sementara *masyaraka* berarti saling bergaul. Dalam hal ini, masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, dan berinteraksi secara langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Hartono juga mengungkapkan hal serupa, bahwa istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia diambil dari kata *musyarak* yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti berkumpul bersama, hidup bersama, saling berhubungan, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat bisa diartikan sebagai kelompok manusia yang terikat dalam suatu hubungan sosial yang melibatkan interaksi antar individu. Interaksi tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang membantu menciptakan kesepakatan sosial di antara anggotanya (Herabudin, 2015: 73).

Dalam konteks masyarakat modern, terdapat dua kelompok utama, yaitu masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan suatu kelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi dalam masyarakat pedesaan umumnya lebih dominan terjadi di dalam kelompok itu sendiri, dengan hubungan antar anggota kelompok yang lebih erat, ketimbang dengan kelompok-kelompok lain yang berada di luar

wilayah mereka (Soekanto, 1982: 146). Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat pedesaan, hubungan sosial lebih bersifat lokal dan terfokus pada anggota kelompok yang tinggal dalam wilayah yang sama.

Menurut Syani (1987: 30), masyarakat berasal dari bahasa Arab *musyarakat*, yang artinya bersama-sama. Kata ini kemudian berkembang menjadi masyarakat, yang mengacu pada suatu keadaan di mana individu-individu hidup bersama, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi dalam sebuah kesepakatan sosial. Proses ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat, yang bukan hanya sekadar kelompok, tetapi juga sebuah sistem interaksi sosial yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bersama.

Masyarakat pada awalnya bisa dipahami sebagai "a union of families," atau gabungan dari beberapa keluarga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk dari hubungan antar individu yang saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil, yang seiring berjalannya waktu berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dan lebih kompleks, yaitu masyarakat. Masyarakat terbentuk dari interaksi antara individu-individu, yang lambat laun membentuk struktur sosial yang lebih besar (Khairuddin, 2008).

Horton, sebagaimana dikutip oleh M. Zaini Hasan (1996: 12-13), mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama,

mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan yang relatif stabil, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial yang berkelanjutan dalam kelompok tersebut. Dalam pandangannya, masyarakat merupakan entitas sosial yang terbentuk melalui interaksi yang panjang dan berkelanjutan, di mana anggota-anggotanya membentuk pola hidup bersama yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasukb budaya, ekonomi, dan kebiasaan sosial.

Linton (1936) juga memberikan definisi yang serupa, yaitu bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah lama hidup atau bekerja sama dalam suatu ruang dan waktu tertentu, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan merasa sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki batasan-batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan suatu struktur sosial yang memiliki identitas kolektif, yang terbentuk melalui kerja sama dan interaksi antara anggotanya dalam periode waktu yang lama. Masyarakat ini memiliki aturan dan norma yang mengikat, serta pola interaksi yang membedakannya dari kelompok sosial lainnya.

Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah tertentu, yang kemudian membentuk suatu sistem kehidupan yang teratur dan terorganisir. Kehidupan dalam masyarakat ini didasarkan pada norma, nilai, serta aturan yang disepakati bersama oleh seluruh anggotanya.

Norma dan nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap individu dalam masyarakat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial, perekonomian, kebudayaan, hingga kehidupan politik. Anggota masyarakat tidak hidup dalam kesendirian, melainkan terjalin dalam hubungan sosial yang erat, yang memfasilitasi interaksi dan kerja sama antar individu. Kerja sama ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari kerjasama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, hingga kerjasama yang lebih kompleks dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Interaksi sosial yang terjalin antara individu-individu ini menciptakan jaringan yang saling menguntungkan dan mendukung satu sama lain. Lebih lanjut, dalam masyarakat terdapat beragam sistem yang saling terkait, seperti sistem sosial yang mencakup hubungan antar individu dan kelompok, sistem ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta sistem budaya yang melibatkan nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem-sistem ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Pentingnya norma dan aturan dalam masyarakat sangat jelas terlihat dalam cara individu berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Setiap individu dalam masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan yang ada,

yang tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga membimbing mereka dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Hal ini menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat, yang memungkinkan setiap individu merasa aman dan dihargai. Dalam proses mencapai kesejahteraan bersama, masyarakat harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial yang ada dalam masyarakat harus dikelola secara efisien dan adil. Proses ini melibatkan setiap individu untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing, sehingga setiap bagian dalam masyarakat turut berperan dalam membangun kemakmuran bersama.

Sebagai kesatuan yang dinamis, masyarakat tidak terlepas dari tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan potensi yang ada untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam hal ini, kerja sama antar anggota masyarakat sangat penting, karena setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat tersebut, serta untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi generasi yang akan datang.

d. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Desa berfungsi berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan karena bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat, namun tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku di negara ini.

Pada dasarnya, konsep desa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui bahwa desa bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi lebih jauh lagi, desa adalah entitas yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan menetapkan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pengaturan berbagai aspek kehidupan mulai dari pemerintahan lokal, ekonomi, sosial, hingga budaya. Desa diberi keleluasaan untuk mengatur urusan-urusan yang dianggap penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, berdasarkan kearifan lokal yang sudah ada sejak

lama dan hak-hak yang tumbuh secara alami dalam komunitas tersebut.

Sebagai tambahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah kecamatan. Desa memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui definisi ini, jelas bahwa desa tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengurus berbagai urusan sosial dan pemerintahan yang bersifat lokal, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih besar, yaitu kabupaten atau kota, dengan kewajiban dan hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa tersebut.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa tersebut menjalankan fungsinya berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut ketentuan ini, desa memiliki hak untuk memformulasikan kebijakan

yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya dan dalam bingkai hukum negara yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki beberapa wewenang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Wewenang tersebut mencakup hal-hal seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Selain itu, desa juga diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakatnya.

Selain aspek administratif dan pemerintahan, desa juga dapat dipahami sebagai sebuah entitas yang melibatkan aktivitas masyarakat dan interaksi mereka dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Desa adalah hasil dari interaksi antara faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang secara dinamis di dalam wilayah tersebut. Sebagai contoh, interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok dalam suatu desa akan membentuk

karakteristik sosial tertentu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika ekonomi, pola budaya, dan struktur politik di desa tersebut. Dalam hal ini, desa bisa menjadi refleksi dari kondisi fisiografi, sosial, dan budaya yang ada di sekitarnya, serta berinteraksi dengan wilayah lainnya yang ada di luar desa tersebut.

Sutardjo Kartohadikusumo (1953) dalam karyanya yang berjudul "Desa" menggambarkan desa sebagai kesatuan hukum yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan mereka secara mandiri. Hal ini mencerminkan bahwa desa bukan hanya sekadar unit administratif yang terpisah dari kehidupan masyarakatnya, tetapi juga sebagai entitas yang secara mandiri memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan kesejahteraan warganya.

Secara etimologis, istilah "desa" berasal dari kata "swadesi" dalam bahasa Sansekerta yang berarti wilayah atau tempat yang mandiri dan otonom. Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian desa berkembang menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang berada di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta memenuhi kebutuhannya sendiri berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan negara. Hal ini mencerminkan kedalaman filosofi desa sebagai entitas yang memiliki akar budaya

yang kuat dan berkembang dalam konteks negara yang lebih luas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syafudin dan Na'a, 2010: 2).

Menurut H.A.W. Widjaja (2009:3), desa dapat dipahami sebagai suatu komunitas hukum yang memiliki struktur yang khas dan spesifik, yang dibangun atas dasar hak asal-usul yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konsep dasar dalam pemerintahan desa mencakup berbagai aspek yang saling terkait, seperti keberagaman, di mana berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama dalam harmoni. Selain itu, terdapat pula keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kehidupan desa. Otonomi yang bersifat asli, yang memberikan desa kebebasan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri, juga menjadi prinsip penting dalam pemerintahan desa. Tidak kalah penting adalah proses demokratisasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan desa secara bebas dan terbuka. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Konsep desa yang dibahas oleh Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul *Tata Negara Majapahit* (1962) mengungkapkan bahwa keberadaan desa di Indonesia sudah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukanlah suatu bentuk administratif yang dibuat oleh penguasa negara, melainkan telah ada sejak terbentuknya masyarakat yang teratur di nusantara. Konsep desa ini memberikan gambaran bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Desa tidak hanya sekadar tempat untuk mengatur pemerintahan lokal, tetapi juga berperan sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas sosial yang lebih luas di tingkat nasional. Dalam hal ini, desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah panjang negara Indonesia.

Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 382), desa didefinisikan sebagai “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.” Definisi ini mempertegas bahwa desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari sejumlah keluarga atau komunitas dengan struktur sosial yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagai kesatuan administratif dan sosial, desa memiliki aturan serta sistem yang berlaku di dalamnya, yang secara langsung dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, dan kondisi sosial

yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan desa memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan latar belakang budaya serta sejarah wilayahnya.

Meskipun sering dikaitkan dengan dunia pertanian, seperti yang diungkapkan oleh Egoen E. Bergel dalam Rahardjo (2014: 29) yang mendefinisikan desa sebagai pemukiman para petani, pengertian desa sebenarnya lebih luas dari sekadar tempat tinggal yang bergantung pada sektor pertanian. Desa tidak selalu harus dicirikan dengan adanya pertanian, meskipun dalam banyak kasus, desa memang sering dikaitkan dengan aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warganya. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu daerah yang difungsikan untuk tempat tinggal suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, di mana terdapat keterikatan sosial yang erat antara anggotanya. Interaksi sosial yang terjadi di dalam desa ini sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang sudah ada sejak lama dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas desa tersebut. Keterikatan masyarakat dengan daerah tempat tinggal mereka tidak hanya terbatas pada aspek tempat tinggal semata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang saling bergantung satu sama lain.

Dalam perspektif yang lebih luas, menurut Landis (dalam Fairus Adira, 2020), pengertian desa dapat diuraikan dalam tiga

aspek yang berbeda. Pertama, dari aspek analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu zona atau wilayah yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa. Kedua, dari aspek kajian sosial-psikologis, desa dipahami sebagai tempat di mana antar warganya terdapat hubungan yang bersifat informal dan memiliki ikatan yang sangat akrab, yang tercermin dalam interaksi sosial yang terjalin di antara

mereka. Ketiga, dari aspek kajian ekonomi, desa sering dipandang sebagai lingkungan yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, di mana mata pencaharian utama sebagian besar warganya adalah bertani dan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ketiga aspek ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sebuah desa dapat dipahami dalam berbagai dimensi kehidupan.

Sedangkan menurut Kusnaedi (2006), desa merupakan suatu kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area yang memiliki badan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan oleh masyarakat setempat. Desa memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri, yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam komunitas desa tersebut. Regulasinya bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, hingga budaya, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan

memperkuat struktur sosial yang ada di dalamnya. Pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan ini menjadi sosok yang memimpin jalannya pemerintahan desa serta menjaga agar segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian, desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan kesatuan sosial dan pemerintahan yang memiliki ciri khas dan identitas tersendiri. Desa memiliki struktur sosial yang saling terkait, serta berfungsi sebagai lembaga yang mengelola kehidupan masyarakatnya berdasarkan prinsip otonomi, kearifan lokal, dan regulasi yang ditetapkan bersama. Dalam hal ini, desa menjadi elemen penting dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di tingkat lokal, sekaligus berperan dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Etimologi kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti "tanah kelahiran." Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1114, pada masa Nusantara masih terdiri atas beberapa kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah. Kata "desa" pada mulanya merujuk pada tempat atau wilayah asal kelahiran seseorang, yang menggambarkan keterikatan emosional antara individu dengan tanah kelahirannya. Dalam konteks ini, desa merupakan bagian dari ruang kehidupan yang memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat dengan komunitas yang ada di

dalamnya. Menurut Gunawan Prayitno (2022), secara umum, desa dapat dipahami sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan terletak jauh dari perkotaan. Desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan hasil dari paduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Paduan ini menghasilkan suatu bentuk kehidupan sosial yang khas, yang mencerminkan interaksi antara faktor-faktor sosial, ekonomi, fisiologi, budaya, dan politik yang ada. Desa dapat dianggap sebagai fenomena kehidupan yang terbentuk melalui proses panjang interaksi manusia dengan alam dan sesamanya, yang menghasilkan pola hidup tertentu yang terus berkembang seiring waktu.

Pendapat lain datang dari Sugimin (2018) dalam jurnalnya yang berjudul *Pemerintahan Desa*. Ia menjelaskan bahwa desa adalah wilayah yang dihuni oleh sekelompok keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam di sekitarnya. Ketergantungan ini menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Desa pada dasarnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari nafkah dan berinteraksi dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warren, sebagaimana dikutip dalam Arifin (2010:78), mengemukakan bahwa desa merupakan suatu bentuk pemukiman yang merupakan kelanjutan dari hubungan antara penduduk dengan lembaga yang ada di wilayah tempat mereka tinggal. Desa bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi juga tentang tempat di mana berbagai aktivitas sosial terjadi, seperti di ladang-ladang yang tersebar dan di desa-desa yang menjadi pusat berbagai interaksi sosial. Di dalam desa, masyarakat berhubungan satu sama lain melalui berbagai bentuk kegiatan sosial, seperti bertukar jasa, tolong-menolong, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial lainnya. Oleh karena itu, desa lebih dari sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan pusat kehidupan sosial yang penuh dengan interaksi antar individu dan kelompok.

N. Daldjoeni (2011:4) dalam penjelasannya juga menyatakan bahwa desa, dalam arti umum, dapat dianggap sebagai pemukiman manusia yang terletak di luar kota, dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani atau bercocok tanam. Desa dengan karakteristik ini umumnya memiliki ketergantungan yang

kuat terhadap alam dan sumber daya alam di sekitarnya. Masyarakat desa memiliki ikatan yang kuat dengan tanah dan lingkungan sekitar, yang menjadi bagian dari identitas mereka.

Menurut Nurcholis (2011:2), desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang saling mengenal satu sama lain. Kehidupan sosial di desa ditandai oleh gotong royong, di mana warga desa bekerja sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, desa juga memiliki adat istiadat yang relatif sama dan tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki karakteristik yang unik, dengan budaya lokal yang hidup dan berkembang di dalamnya.

Paul H. Landis (2014:15) mendefinisikan desa sebagai daerah yang hubungan sosial antar warganya ditandai dengan intensitas yang tinggi. Desa memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, biasanya kurang dari 2500 orang, dan sering kali berfungsi sebagai komunitas yang erat dengan hubungan sosial yang sangat dekat antara sesama anggotanya. Desa dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar memfasilitasi interaksi sosial yang lebih intens dan memperkuat ikatan sosial antar individu.

Secara tradisional, istilah desa terutama dikenal di pulau Jawa dan Bali. Desa sering kali dikaitkan dengan komunitas agraris yang hidup di luar kota, dengan mata pencaharian utama di sektor

pertanian. Namun, menurut Daldjoeni (1998), desa tidak hanya terbatas pada pemukiman yang bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga merupakan bentuk pemukiman yang lebih luas yang tersebar di berbagai wilayah. Desa yang tersebar di luar kota sering kali terdiri dari beberapa dukuh yang berfungsi sebagai unit geografis yang lebih kecil. Duku ini sendiri bisa berwujud sebagai kumpulan rumah atau pemukiman yang terletak di tengah sawah atau hutan, yang menjadi bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang ada di desa tersebut. Di wilayah Jawa Barat, misalnya, istilah kampung sering digunakan untuk menyebut dukuh atau pemukiman kecil ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa desa, yang di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dikenal dengan istilah kalurahan, merupakan sebuah entitas yang sangat penting dalam struktur pemerintahan negara. Desa bukan hanya sekadar wilayah atau pemukiman, tetapi juga sebuah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui secara sah. Dalam konteks ini, desa memiliki kewenangan yang sangat penting dalam mengelola pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada di dalam komunitas tersebut.

Keberadaan desa tidak terlepas dari inisiatif masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik serta

kebutuhan masyarakat lokal itu sendiri. Salah satu landasan utama dalam pembentukan desa adalah hak asal-usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal-usul ini mencerminkan pentingnya tradisi dan kearifan lokal yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari identitas masyarakat desa tersebut. Hak-hak tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan politik desa, serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengatur urusan mereka sendiri. Desa terbentuk melalui serangkaian interaksi antara sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dengan lingkungan mereka. Interaksi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kondisi fisiografi yang mencakup topografi dan lingkungan alam, serta faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di dalamnya. Faktor-faktor tersebut membentuk struktur dan kehidupan masyarakat desa yang unik, yang tentunya berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, meskipun masih berada dalam sistem yang sama. Misalnya, dalam hal ekonomi, beberapa desa lebih bergantung pada sektor pertanian, sementara desa lainnya mungkin memiliki fokus yang berbeda, seperti pariwisata atau kerajinan tangan, tergantung pada potensi alam dan budaya setempat. Sebagai entitas hukum yang diakui, desa tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan internalnya,

tetapi juga memiliki otonomi yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam hal penyelenggaraan urusan administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan desa dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan mereka dalam musyawarah dan forum-forum diskusi yang dilaksanakan untuk merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, desa bukan hanya sekadar pemukiman atau wilayah administratif, tetapi juga merupakan entitas yang sangat berperan dalam sistem pemerintahan negara. Desa sebagai komunitas hukum memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Melalui struktur pemerintahan desa yang otonom, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber daya dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

H. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam dan rinci. Menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami (berbeda dengan eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan oleh manusia. Penelitian ini mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya (Sukmadinata 2017:72).

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh entitas yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1. Pemerintah kalurahan Timbulharjo
2. Ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai lembaga pengembangan desa wisata
3. Masyarakat desa wisata Tembi

c. Objek penelitian

kalurahan Timbulharjo dalam pelaksanaan Desa wisata. Objek penelitian merujuk pada kondisi yang menjelaskan atau menggambarkan situasi dari objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penelitian tersebut. Menurut Supriati (2012: 38), objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pelaksanaan Desa wisata.

d. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa wisata Tembi, kalurahan Timbulharjo, kapanewon Sewon, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau kondisi yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat langsung.

Dalam penelitian ini, yang akan diamati adalah strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan desa wisata serta pemberdayaan masyarakat sadar wisata di desa wisata Tembi.

2. Interview/wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik yang sedang diteliti. Proses wawancara dapat dilakukan

dengan pendekatan terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir walaupun demikian peneliti akan tetap menyediakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian atau informan yang di wawancara. Isi wawancara nantinya akan sesuai dengan fokus penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan serta analisis dokumen atau catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dokumen berupa gambar dan dokumen lain yang dimiliki instansi terkait yang sesuai dengan topik penelitian.

f. Teknik analisis data

Bogdan dalam Hardani, (2020: 161-162) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Sementara itu, menurut Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020: 163),

analisis data melibatkan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. langkah tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dokumen analisis, wawancara mendalam, dan observasi merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta sebagai bahan penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah komponen dari analisis data yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan dan diverifikasi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data mencakup pengorganisasian informasi yang telah diperoleh di lapangan ke dalam bentuk matriks. Penyajian ini bisa melibatkan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Penyajian data dilakukan untuk

memperoleh pemahaman menyeluruh atau mengenai bagian-bagian tertentu dari keseluruhan. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan mengenai relevansi data terhadap tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan dipadatkan, disusun secara lebih sistematis, dan menyoroti hal-hal penting agar lebih mudah dikelola.

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi hubungan, kesamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung, serta dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN TIMBULHARJO

A. Pemberdayaan masyarakat di kalurahan Timbulharjo

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Tembi

Desa Wisata Tembi berkembang berkat peran aktif masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dengan dukungan pemerintah kalurahan serta koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pengelolaan desa wisata ini menitikberatkan pada keberlanjutan budaya dan lingkungan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya eksploitasi komersial yang berlebihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata terwujud dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui penyediaan homestay, kuliner, dan pertunjukan seni, maupun secara tidak langsung melalui distribusi manfaat ekonomi kepada warga sekitar. Walaupun sempat menimbulkan perbedaan pendapat di awal, seiring waktu manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin memperkuat dukungan terhadap keberadaan desa wisata. Pemerintah kalurahan memiliki peran dalam menyediakan lahan serta menjembatani

koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, program pemberdayaan yang diberikan masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih mengandalkan inisiatif sendiri serta dukungan dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mengembangkan promosi digital dan inovasi produk wisata.

Salah satu sektor yang berkembang adalah ekonomi kreatif, terutama dalam produksi batik dan ecoprint. Meskipun batik tradisional mengalami tantangan karena memerlukan keahlian khusus, ecoprint lebih mudah dipelajari dan berkembang secara mandiri. Inovasi yang berkelanjutan dalam sektor ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengembangkan potensi desa wisata secara independen meskipun minim dukungan dari pemerintah.

Secara keseluruhan, Desa Wisata Tembi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui sektor homestay dan wisata berbasis budaya. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya keterlibatan generasi muda dan terbatasnya dukungan pemerintah dalam pengelolaan wisata serta pengembangan usaha kreatif. Dengan semangat kemandirian dan gotong royong, masyarakat terus mengembangkan desa wisata ini sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya melestarikan

budaya lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat

Selain keterlibatan masyarakat lokal dalam pemberdayaan masyarakat terdapat juga pihak-pihak lain yang ikut serta membantu dalam upaya tersebut, pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Tembi melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berkontribusi dengan menghadirkan program pengembangan berbasis aspirasi masyarakat sadar wisata setempat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing desa wisata melalui pelatihan dan pendampingan.

Selain pemerintah daerah, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Widya Mataram turut serta dalam mendukung pengelolaan desa wisata melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN berperan dalam membantu strategi pemasaran dan promosi digital desa wisata. Sementara itu,

Universitas Widya Mataram turut memberikan pendampingan dalam aspek hukum guna memperkuat tata kelola desa wisata.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kalurahan Timbulharjo turut berperan dalam meningkatkan daya tarik wisata melalui berbagai inisiatif, seperti peningkatan keamanan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan platform digital sebagai media promosi. Kalurahan Timbulharjo juga menetapkan Desa Wisata Tembi sebagai model pengembangan wisata bagi padukuhan lain dan menyusun master plan desa pada tahun 2021 untuk menjadikannya sebagai pusat pengembangan wisata berbasis komunitas. Desa Wisata Tembi juga menjadi bagian dari program Gabusan Manding Tembi (GMT), yang bertujuan memperkuat ekosistem wisata dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan layanan seperti jasa, kuliner, dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam aspek ekonomi lokal, pemerintah kalurahan menjalankan program pemberdayaan dengan mendirikan pasar kuliner, menyewakan tanah khas desa untuk kegiatan wisata, serta mengelola sistem pengolahan sampah. Saat pandemi COVID-19, upaya pemberdayaan juga diarahkan pada budidaya lele dan produksi batik ecoprint, guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

3. Program pemberdayaan yang dilakukan

Berbagai program pemberdayaan telah diterapkan di Desa Wisata Tembi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan dalam menyediakan program pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sadar wisata, guna meningkatkan potensi desa wisata secara berkelanjutan.

Selain itu, perguruan tinggi seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Widya Mataram turut berkontribusi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam program ini, mahasiswa membantu desa wisata dalam berbagai aspek, seperti promosi digital, strategi pemasaran, dan pengelolaan wisata. Universitas Widya Mataram juga memberikan pendampingan dalam aspek hukum untuk memperkuat tata kelola desa wisata.

Pemerintah Kalurahan Timbulharjo menjalankan berbagai strategi pemberdayaan untuk meningkatkan daya tarik wisata, termasuk peningkatan keamanan, peningkatan kualitas layanan, serta promosi melalui media digital. Desa Wisata Tembi juga dijadikan sebagai model pengembangan wisata bagi padukuhan lain di wilayah Timbulharjo. Pada tahun 2021, disusun master plan desa yang menjadikan Tembi sebagai pusat pengembangan wisata berbasis komunitas.

Selain itu, desa ini juga tergabung dalam program Gabusan Manding Tembi (GMT), yang bertujuan memperkuat ekosistem wisata melalui pemberdayaan masyarakat dalam sektor jasa, kuliner, dan layanan pendukung lainnya.

Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, pemerintah kalurahan telah melaksanakan berbagai program, seperti pembangunan pasar kuliner, penyewaan tanah khas desa untuk kegiatan wisata, serta pengelolaan sampah. Saat pandemi COVID-19, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan budidaya ikan lele dan produksi batik ecoprint, sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan berbagai program pemberdayaan ini, masyarakat Desa Wisata Tembi didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi wisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Meskipun berbagai pihak telah terlibat dalam upaya pemberdayaan, terdapat kendala dalam implementasi program. Sebagian masyarakat menilai bahwa dukungan dari pemerintah dalam pengembangan desa wisata masih terbatas, baik dari segi variasi program maupun keberlanjutan pelaksanaannya. Akibatnya, masyarakat lebih banyak mencari pelatihan dan inovasi dari pihak eksternal untuk

mengembangkan potensi wisata di Desa Wisata Tembi secara mandiri.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA TEMBI

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan pembahasan mengenai data hasil penelitian yang dilengkapi dengan interpretasi berdasarkan kondisi umum lokasi penelitian serta permasalahan yang dikaji. Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang valid. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan data dokumen dan diuraikan berdasarkan dua (2) fokus penelitian.

A. Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Tembi

Desa Wisata Tembi dikenal karena keindahan alamnya serta keberadaan homestay yang menawarkan pengalaman menginap dengan nuansa pedesaan. Selain itu, desa ini juga terkenal sebagai pusat kerajinan, di mana banyak warga setempat bekerja sebagai pengrajin atau karyawan di sektor kerajinan desa wisata. Wisatawan yang berkunjung memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung proses pembuatan berbagai produk kerajinan, bahkan dapat berpartisipasi dalam pembuatannya. Produk yang dihasilkan oleh para pengrajin mencakup tas batik, aksesoris, dan berbagai jenis kerajinan lainnya.

Namun, tidak semua masyarakat sekitar terlibat aktif dalam kegiatan wisata dan kerajinan di desa ini. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi manfaat dari sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari segi perencanaan, keterlibatan masyarakat tergolong cukup baik, ditunjukkan oleh tingginya tingkat kehadiran warga dalam diskusi dan perencanaan program desa wisata. Namun, dalam tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat masih terbatas, sehingga belum semua warga dapat berkontribusi secara maksimal. Akibatnya, manfaat ekonomi dan sosial dari desa wisata lebih banyak dirasakan oleh individu atau kelompok yang aktif berpartisipasi, sementara sebagian lainnya belum mendapatkan dampak yang signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan desa wisata, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh warga. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik yang sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Roykha Fadillatul Baity, SP yang merupakan carik di kalurahan Timbulharjo, wawancara dilakukan pada tanggal 8 januari, dalam wawancara tersebut ibu carik menyampaikan beberapa hal yang yaitu:

“Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pelaksanaan desa wisata adalah Menciptakan suasana atau kondisi yang semakin menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Tembi, misalnya dalam hal keamanan dan layanan keramahan yang dikembangkan di desa wisata tersebut. Selain itu, pihak kami, khususnya Pak Dukuh, biasanya mengajukan usulan terkait pengembangan wisata. Kami juga melakukan promosi melalui situs web setiap kali ada acara atau event di Desa Wisata Tembi. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, kami berperan dalam memfasilitasi kegiatan di tingkat padukuhan. Program pemberdayaan yang saat ini berjalan berfokus pada pengelolaan sampah, karena kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penilaian bagi sebuah desa wisata. Selain itu, pemerintah juga menyediakan tanah khas desa yang dimanfaatkan oleh warga untuk mendirikan kafe sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di Tembi. Meskipun peningkatan ekonomi belum secara langsung, produk-produk UMKM di Timulharjo terkadang juga dititipkan di Tembi. Hal ini turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di padukuhan lain. Untuk interaksi dengan masyarakat Tembi Hingga saat ini, kami terus saling mendukung, termasuk dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di Tembi. Sebagai contoh, ketika ada kunjungan dari Jakarta, kami mengarahkan mereka ke Tembi sebagai salah satu destinasi wisata utama. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan, seperti pelatihan keamanan, karena kebersihan dan kenyamanan merupakan aspek penting dalam pariwisata. Selain itu, Timbulharjo telah berkembang menjadi desa wisata mandiri, dengan Tembi sebagai titik utamanya. Desa wisata merupakan program khusus dari pemerintah Kalurahan, karena Desa Wisata Tembi termasuk dalam salah satu program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Gabusan Manding Tembi (GMT). Dengan demikian, Tembi telah menjadi bagian dari program strategis DIY, dan kami pun mendukung pengembangannya sebagai desa wisata. Harapannya, padukuhan lain juga dapat mengembangkan potensi wisata yang dimiliki masing-masing. Selain itu, Dana Desa juga diusulkan untuk mendukung pengembangan potensi desa wisata.”



***Gambar Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Padukuhan Tembi (PPBMP)***

Di hari yang sama dengan wawancara sebelumnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Catur Kristanto, A.Md yang merupakan Ulu-ulu kalurahan Timbulharjo, dalam wawancara tersebut pak catur menyampaikan beberapa hal yaitu:

“Strategi pemerintah dalam mengembangkan desa wisata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, promosi dan publikasi mengenai Desa Wisata Tembi juga terus dilakukan agar masyarakat lebih mengenal potensinya. Setiap ada kunjungan dinas, tamu juga diarahkan untuk berkunjung ke desa wisata sebagai bagian dari upaya pengenalan dan pengembangannya. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Desa Wisata Tembi cukup banyak, terutama karena banyak desa wisata lain yang juga berkembang. Beberapa desa wisata memiliki keunggulan, seperti pemandangan alam yang lebih indah. Namun, kami tetap berusaha berinovasi dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan di Tembi, seperti outbound dan kegiatan kebudayaan, agar tetap menarik bagi pengunjung. Masyarakat sangat dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini berawal dari inisiatif masyarakat yang menyambut baik konsep desa wisata ini, termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan

desa wisata. Peran serta masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan tertata rapi. Tantangannya adalah melibatkan masyarakat Tembi dalam setiap kegiatan yang mendukung desa wisata, seperti workshop batik dan angkringan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, pihak Kalurahan juga turut mendukung melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan barang-barang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di desa wisata Tembi. Manfaat utama bagi masyarakat adalah peningkatan pendapatan tambahan. Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam kegiatan budaya, seperti menjadi narasumber atau pembimbing dalam pembuatan batik, yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bernilai ekonomi dan budaya. Pemerintah Kalurahan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan berbagai kegiatan atau atraksi wisata yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, seperti penyediaan tempat untuk kegiatan wisata dan mendukung usaha-usaha yang ada di desa wisata.” Meskipun sudah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya desa wisata lain dan homestay yang juga berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru untuk memastikan desa wisata Tembi tetap memiliki daya saing dengan tempat wisata lainnya. Program desa wisata disambut baik oleh masyarakat Tembi, terbukti dari kekompakan mereka dalam menyambut tamu yang berkunjung. Tidak ada konflik antara masyarakat dengan tamu atau antar masyarakat. Keberhasilan ini dapat tercapai berkat dukungan penuh dari masyarakat dan pemimpin setempat, seperti Pak Dukuh Ibnu. Salah satu program pemberdayaan yang diterapkan adalah pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga di Padukuhan Tembi, dengan tujuan agar sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan polusi. Program lainnya yang akan dilaksanakan adalah penanaman buah untuk mendukung keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan.”



Gambar kegiatan pendampingan SDM desa wisata

Pada tanggal enam (6) Januari saya melakukan wawancara dengan dukuh Tembi yaitu pak Ibnu sebelum melakukan wawancara pak Ibnu menjelaskan sejarah dan kegiatan di desa wisata tembi

“Desa Wisata Tembi telah ada cukup lama, sejak tahun 1998, dan saat itu merupakan satu-satunya desa wisata di Indonesia. Desa ini pertama kali dibentuk oleh seorang warga negara Australia yang kini memiliki The Omah Hotel. Dia yang memulai pemikiran untuk menjadikan Tembi sebagai desa wisata dan bekerja sama dengan kami, karena kami memiliki potensi. Jika dia memiliki tamu, kami bekerja sama untuk menampilkan kesenian seperti gejuk lesung, klonengan, dan lainnya. Kami juga mulai mengembangkan beberapa homestaynya. Pada awalnya, pemikiran masyarakat mengenai desa wisata masih kurang menguntungkan, karena mereka menganggap tempat wisata hanya berupa pantai atau gunung yang menyajikan pemandangan alam yang indah. Namun, pada saat gempa bumi tahun 2006, desa wisata sempat berhenti, dan kemudian didirikan kembali bersamaan dengan program rekonstruksi Bantul Bangkit. Kami membangun kembali desa wisata, dan pada tahun 2008, desa wisata ini diresmikan oleh Gubernur DIY, lengkap dengan prasasti. Kami percaya bahwa desa wisata tidak hanya harus berfokus pada pemandangan alam yang indah, tetapi juga dapat meliputi wisata budaya, wisata pertanian, dan wisata kerajinan. Di Desa Wisata Tembi, banyak terdapat pengrajin, dan kami didukung dengan adanya homestay. Pasca gempa,

kami mendapatkan bantuan rumah yang bentuknya seragam, yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kami juga mendapat dukungan dari Kalurahan yang menyediakan tanah untuk dijadikan tempat atraksi wisata. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kampus. Kampus pertama yang bekerja sama dengan kami adalah Atma Jaya, yang membantu kami mengembangkan desa wisata ini. Mereka membimbing kami sejak awal, memberikan panduan tentang apa yang harus dijual, bagaimana cara memasarkan, mengelola, dan melayani tamu. Kampus Atma Jaya juga mengadakan KKN berkelanjutan dan tematik di sini, di mana mereka menggali potensi yang ada di Tembi dan mengembangkannya, termasuk membantu mendatangkan tamu. Setelah dua hingga tiga tahun, hasilnya mulai dapat dinikmati. Saat ini, yang kami tawarkan di Desa Wisata Tembi adalah wisata budaya, seperti gejuk lesung, gamelan, dan tari-tarian. Kami juga memiliki wisata kerajinan, seperti pembuatan batik, serta wisata kuliner, seperti cara membuat tempe dan makanan tradisional sagon. Selain itu, ada juga wisata pertanian, seperti membajak sawah menggunakan kerbau dan menanam padi secara tradisional. Semua kegiatan ini kami gabungkan dalam sebuah paket wisata, sehingga setiap tamu yang datang dapat menikmati berbagai pengalaman tersebut. Pemerintah Kalurahan juga berperan dengan menyediakan tanah khas desa untuk dikelola menjadi tempat atraksi wisata, dan kini hal tersebut sudah berjalan dengan baik.

Desa Wisata Tembi memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah budidaya ikan lele, yang juga menjadi bagian dari paket wisata yang ditawarkan. Selain itu, ada juga program ekoprint sebagai bagian dari kegiatan desa wisata. “Keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan desa wisata terwujud melalui struktur organisasi yang dikenal dengan nama Pokgi (Kelompok Kegiatan Desa Wisata). Organisasi ini sudah berjalan dengan anggota yang aktif. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam bidang UMKM, di mana mereka menyediakan barang-barang yang bisa dibeli oleh pengunjung. Beberapa ibu-ibu juga menyediakan konsumsi ketika ada tamu yang datang, dan masyarakat yang memiliki homestay turut berperan dalam kegiatan ini. Pada awalnya, keberadaan desa wisata Tembi memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika ada kegiatan malam seperti konser musik, yang dianggap mengganggu karena menimbulkan kebisingan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai terbiasa dan kini

mereka bahkan merasa senang dengan kegiatan-kegiatan desa wisata yang diadakan. Pelaksanaan desa wisata Tembi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat yang memiliki usaha terkait wisata seperti homestay atau UMKM merasakan manfaatnya, namun bagi masyarakat lainnya yang tidak terlibat langsung, pendapatan yang diperoleh dari desa wisata ini bersifat tidak tetap. Hal ini terutama dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki usaha terkait pariwisata, karena kegiatan wisata tidak berlangsung setiap hari. Tantangan utama dalam pengelolaan desa wisata Tembi terutama terjadi pada awalnya, ketika banyak desa wisata baru bermunculan, terutama di wilayah Bantul. Namun, pengelolaan desa wisata Tembi berjalan maksimal, sehingga keberlanjutannya dapat terjaga hingga sekarang, tidak hanya sebatas keberhasilan di awal. Adanya desa wisata Tembi memberikan pengaruh terhadap peningkatan lapangan pekerjaan, terutama di tingkat padukuhan. Meskipun di tingkat Kalurahan Timbulharjo dampaknya tidak terlalu besar, desa wisata Tembi menjadi patokan atau contoh bagi desa wisata di padukuhan lain. Bahkan, beberapa pihak dari daerah lain seperti dari Malang contohnya belajar tentang pengelolaan desa wisata di Tembi, meskipun Tembi tidak memiliki destinasi wisata alam yang besar. Terkait dengan peningkatan ekonomi, yang paling merasakan manfaat adalah pemilik homestay, karena banyak wisatawan yang menginap. Selain itu, UMKM juga mendapatkan keuntungan dari pengunjung yang berbelanja di warung-warung mereka. Homestay di Tembi memiliki beberapa tipe, yaitu homestay yang menyediakan rumah kosong untuk tamu, homestay yang memungkinkan tamu tinggal bersama pemilik rumah (masyarakat Tembi), dan juga ada homestay dengan fasilitas AC dan tanpa AC.”



Homestay AC



Homestay non AC

Di hari terakhir penelitian tanggal 11 Januari 2025 peneliti melakukan wawancara dengan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (lpmKAL) yaitu mas Hatta Efendi, dalam wawancara yang berlangsung sore hari itu ada beberapa informasi yang berhasil didapatkan diantaranya adalah:

“Pemerintah Kalurahan Timbulharjo memiliki strategi khusus dalam mengembangkan desa wisata, salah satunya dengan menjadikan Padukuhan Tembi sebagai pusat pengembangan wisata. Meskipun tidak ada kebijakan langsung yang secara khusus mengatur desa wisata, pemerintah tetap memandang Kalurahan Timbulharjo sebagai satu kesatuan wilayah yang saling berjejaring. Tembi, sebagai daerah yang sudah dikenal luas, dijadikan sebagai acuan atau "kiblat" dalam pengembangan wisata di padukuhan lainnya. Pada tahun 2021, pemerintah menyusun master plan desa yang mencakup perencanaan pengembangan seluruh padukuhan, dengan Tembi sebagai pusat rujukan. Selain itu, program dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Gabusan Manding Tembi (GMT) turut diikuti untuk memperkuat ekosistem wisata. Upaya yang dilakukan mencakup pengintegrasian Tembi dengan padukuhan lain, di mana masyarakat sekitar turut mendukung dengan menyediakan jasa, kuliner, dan layanan lainnya guna menciptakan sinergi dalam pengembangan pariwisata. Namun, dalam implementasi desa wisata di Tembi, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keberlanjutan bisnis wisata. Homestay memang menjadi daya tarik utama dan banyak diminati wisatawan karena lokasinya yang strategis, berada di antara kawasan pantai dan pusat kota. Bahkan, saat ada acara besar seperti Prambanan Festival, penginapan di Tembi sering menjadi pilihan wisatawan. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk mendirikan dan mengelola homestay secara mandiri, sehingga pengelolaan bisnis wisata menjadi tantangan tersendiri. Sebagai solusi atas tantangan tersebut, pemerintah telah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu upayanya adalah pembentukan pasar kuliner di Tembi yang melibatkan masyarakat setempat dalam menjajakan makanan khas seperti angkringan. Namun, perbedaan mencolok masih terlihat

antara pengusaha homestay yang sudah mapan, seperti Pak Dawut, dengan masyarakat yang baru memulai usaha. Pak Dawut menjadikan bisnis homestay sebagai profesi utama, sementara masyarakat lainnya lebih menganggapnya sebagai sumber penghasilan tambahan. Akibatnya, mereka baru mendapatkan tamu ketika homestay yang lebih dikenal sudah penuh, sehingga banyak yang akhirnya beralih ke pekerjaan lain. Pemerintah kalurahan berusaha mendukung pemberdayaan ini dengan menyediakan pelatihan dan bantuan pendanaan, meskipun cakupan program masih terbatas karena Kalurahan Timbulharjo memiliki enam belas (16) padukuhan yang juga memerlukan perhatian yang merata. Selain itu, pemerintah juga menyewakan tanah khas desa untuk mendukung pengembangan wisata di Tembi. Program ini memungkinkan padukuhan untuk mengelola tanah khas desa untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan GOR, tempat wisata, atau lapangan bersama. Saat pandemi COVID-19, beberapa program pemberdayaan seperti budidaya ikan lele dan produksi batik ecoprint telah berjalan. Namun, hingga saat ini, belum ada program khusus yang fokus pada pengelolaan homestay. LPMKal telah mengusulkan kepada pemerintah kalurahan agar segera merancang program pemberdayaan di bidang tersebut, dengan harapan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Meskipun terdapat beberapa individu yang lebih dominan dalam bisnis desa wisata, seperti Pak Dawut dan Pak Tatang, peluang bagi masyarakat lain tetap terbuka. Namun, untuk mencapai kesuksesan serupa, diperlukan modal dan komitmen yang tinggi, terutama dalam memiliki aset properti seperti homestay yang memadai dan menjadikannya sebagai profesi utama. Desa wisata sendiri telah menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Kalurahan Timbulharjo. Pembangunan di kaluraha Timbulshrjo diklasifikasikan dalam empat hierarki utama, yaitu: (1) Tembi sebagai kawasan wisata, (2) kalurahan sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, (3) Stadion Sultan Agung sebagai area permukiman dan olahraga, serta (4) kawasan pertanian. Setiap kali ada lomba desa, Tembi selalu dipilih sebagai lokasi transit bagi para juri, menunjukkan perannya yang penting dalam perkembangan wisata di Timbulharjo.”



Gambar Dinas Pariwisata Bantul mengadakan Pelatihan Digitalisasi pemasaran dan penjualan pada desa wisata.

Dalam penelitian, peneliti menyiapkan data dokumen yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Data ini digunakan sebagai sumber referensi atau bukti dalam analisis penelitian. Berikut beberapa jenis data dokumen dalam penelitian.

Berdasarkan peraturan kalurahan Timbulharjo nomor 7 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKAL) kalurahan Timbulharjo tahun anggaran 2024, pendapatan asli desa (PAD) kalurahan Timbulharjo adalah sebesar Rp.600.000.00, pendapatan transfer sebesar Rp. 5.647.054.767 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp.14.011.611, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mendapatkan anggaran paling besar yaitu sebesar Rp. 3.679.123.526 dan yang terkecil adalah bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.183.740.920. sementara sub bidang pariwisata pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata mendapatkan anggaran sebesar Rp.000.000.000.

Berdasarkan data dari rencana pembangunan jangka menengah kalurahan (rpjm-kalurahan) kalurahan Timbulharjo, desa wisata bukanlah termasuk dari visi-misi, program kerja atau program prioritas kalurahan Timbulharjo dan dana yang digunakan dalam bidang pariwisata untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata adalah Rp.000.000.000.

Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, yang bertujuan untuk membangun atau mengubah struktur dan lembaga agar dapat memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan kedua melibatkan aksi sosial dan politik, yang dilakukan melalui perjuangan politik serta gerakan untuk membangun kekuasaan yang efektif. Sedangkan pendekatan ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, yang dilaksanakan dengan menyediakan proses pendidikan yang komprehensif untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat lapisan bawah dalam menentukan arah hidup mereka.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1). Pendekatan pertama adalah pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan. Di kalurahan Timbulharjo perencanaan untuk pengembangan desa wisata belum di realisasikan, selain itu program desa wisata bukanlah program kerja atau prioritas dalam rencana pembangunan yang menyebabkan akses terhadap sumber daya, pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengembangan

desa wisata belum maksimal, walaupun kalurahan Timbulharjo sudah mengikuti program gabusan manding tembi (GMT) yang mendukung desa wisata tapi itu bukanlah program yang dibuat oleh pemerintah kalurahan melainkan dibuat oleh pemerintah D.I.Y, oleh karena itu pemerintah kalurahan Timbulharjo harus memiliki kebijakan khusus untuk pengelolaan dan pengembangan desa wisata di kalurahan Timbulharjo. (2). melibatkan aksi sosial dan politik. Kalurahan Timbulharjo sudah melakukan aksi sosial dan politik dalam pengembangan desa wisata berupa promosi di website dan pada saat kunjungan kerja, namun aksi yang diberikan dinilai masih dianggap kurang, seharusnya masyarakat bisa mengadakan sebuah acara atau event khusus yang bertujuan untuk memperkenalkan desa wisata kepada khalayak umum. Dan yang terakhir (3). pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran. Selama ini pemerintah kalurahan Timbulharjo sudah banyak melakukan program-program pelatihan agar masyarakat desa wisata tembi lebih paham dengan potensi yang mereka miliki, seperti contohnya adalah pelatihan pembuatan batik ecoprint, budidaya ikan lele, namun pada kenyataannya program tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo

Desa Wisata Tembi memiliki potensi alam yang indah dan dikenal dengan keberadaan homestay yang memberikan pengalaman menginap bernuansa pedesaan. Selain itu, desa ini menjadi sentra kerajinan yang

melibatkan masyarakat setempat sebagai pengrajin maupun pekerja di sektor industri kreatif berbasis wisata. Selama observasi, terlihat bahwa wisatawan yang datang tidak hanya menikmati suasana desa, tetapi juga dapat menyaksikan langsung proses pembuatan berbagai kerajinan. Bahkan, mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan produk, seperti tas batik, aksesoris, dan beragam jenis kerajinan tangan lainnya.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam sektor wisata dan kerajinan masih bervariasi. Dalam tahap perencanaan program desa wisata, tingkat partisipasi warga tergolong cukup tinggi, terlihat dari keikutsertaan mereka dalam diskusi dan musyawarah desa. Namun, dalam tahap pelaksanaan, belum semua warga turut serta secara aktif, sehingga kontribusi mereka dalam pengembangan desa wisata masih terbatas. Akibatnya, manfaat ekonomi dan sosial dari desa wisata lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang terlibat aktif, sementara sebagian warga lainnya belum memperoleh dampak yang signifikan.

Berdasarkan hasil observasi ini, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata, sehingga seluruh warga desa dapat merasakan dampak positif dari perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Desa Wisata Tembi.

Pada tanggal 13 Desember 2024 saya melakukan wawancara dengan bapak Dawut selaku ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) desa

wisata Tembi, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pak Dawut saya mendapatkan beberapa informasi yaitu:

“Pengelolaan Desa Wisata Tembi dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah eksploitasi yang hanya berorientasi pada keuntungan. Dengan sistem ini, desa wisata dapat terus berkembang dan dinikmati oleh generasi mendatang. Berbeda dengan wisata konvensional, kunjungan ke Desa Wisata Tembi memerlukan reservasi terlebih dahulu. Setelah reservasi dilakukan, atraksi wisata diselenggarakan sesuai permintaan wisatawan dalam jangka waktu tertentu, seperti seminggu atau sebulan kemudian. Dalam pelaksanaan desa wisata, partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan mereka dalam struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, serta berbagai tim seperti outbound, kuliner, dan batik. Pengurus desa wisata tidak menerima gaji bulanan tetap, melainkan memperoleh penghasilan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan wisata. Selain itu, sebagian dana yang diperoleh dari desa wisata dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti RT, Karang Taruna, dan masjid. Jumlah tim yang dibutuhkan dalam operasional wisata bergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Jika ada 100 pengunjung, maka sekitar 20 orang tenaga profesional diperlukan agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah Kalurahan Timbulharjo turut berperan dalam pengelolaan desa wisata dengan menyediakan lahan untuk atraksi wisata dengan harga sewa yang terjangkau. Selain itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata Tembi selalu berkoordinasi dengan pihak kalurahan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program wisata. Dalam hal pengelolaan homestay, beberapa unit dikelola oleh pihak luar desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal dari pemilik rumah untuk mengembangkan usaha mereka, serta kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran, terutama dalam memanfaatkan platform digital seperti Traveloka.”



Gambar wisata pertanian desa wisata Tembi.

Selain wawancara dengan ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS), saya juga melakukan wawancara dengan pak Aris Langgeng yang merupakan sekretaris kelompok sadar wisata (POKDARWIS) desa wisata Tembi, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama pak Aris saya banyak mendapatkan informasi mengenai desa wisata Tembi dan program pemberdayaan yang ada, berikut adalah hasil wawancara dengan pak Aris:

“Desa Wisata Tembi berkembang karena tiga faktor utama, yaitu lokasi yang strategis di antara Pantai Parangtritis dan Kota Yogyakarta, pemanfaatan sumber daya alam meskipun terbatas, serta peran aktif sumber daya manusia dalam mengelola potensi wisata. Salah satu daya tarik utama adalah homestay, yang mengadaptasi rumah tradisional menjadi tempat menginap. Selain itu, wisatawan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan edukatif, seperti aktivitas pertanian (menanam padi, membajak sawah dengan kerbau, menangkap bebek), kebudayaan (gamelan, gejuk lesung, angklung), serta kuliner (pembuatan tempe dan sagon). Beragam permainan tradisional juga menjadi bagian dari pengalaman wisata. Homestay di Tembi telah dikenal hingga tingkat regional ASEAN, menjadikannya elemen penting dalam pengembangan desa wisata. Pada awal pendiriannya, keberadaan desa wisata sempat menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat karena manfaatnya belum terlihat jelas. Namun, seiring waktu, manfaat ekonomi yang dihasilkan mulai dirasakan secara luas. Partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan desa wisata terbagi menjadi dua kategori, yakni langsung dan tidak langsung. Tim khusus menangani berbagai aspek operasional, seperti penyediaan sepeda, kuliner, kesenian, dan pengelolaan homestay. Sementara itu, masyarakat yang tidak terlibat secara langsung tetap mendapatkan manfaat melalui distribusi dana kepada setiap RT di akhir tahun. Kalurahan Timbulharjo turut berperan dalam mendukung pengelolaan desa wisata dengan menyediakan tanah khas desa yang disewakan dengan harga terjangkau untuk keperluan atraksi wisata. Meskipun dukungan dari kalurahan masih terbatas dibandingkan dengan tingkat kabupaten, provinsi, atau kementerian, beberapa pelatihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, telah diberikan. Pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan homestay dan pengembangan desa wisata lebih banyak difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Selain itu, desa wisata ini juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Atma Jaya melalui program KKN tematik pasca-gempa tahun 2006, serta Universitas Widya Mataram dalam bidang pengembangan hukum desa wisata. Kalurahan Timbulharjo sebenarnya memiliki program pengembangan homestay di wilayah timur dengan konsep wisata religius. Namun, perkembangan program ini masih belum optimal karena minimnya partisipasi masyarakat. Sebagai bagian dari Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), pengelola desa wisata menyadari bahwa potensi wisata tidak hanya terpusat di Tembi, tetapi juga terdapat di padukuhan lain, seperti wisata kuliner dan kerajinan. Namun, minat generasi muda untuk mengembangkan potensi tersebut masih tergolong rendah. Dari segi ekonomi, Desa Wisata Tembi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama melalui pengelolaan homestay. Selain itu, kunjungan wisatawan menciptakan berbagai peluang ekonomi lain, seperti penyediaan sepeda, jasa pemandu wisata, serta berbagai workshop kerajinan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berbelanja. Dengan demikian, keberadaan desa wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung pelestarian budaya tradisi lokal.”



Gambar usaha kuliner di desa wisata Tembi.

Pada tanggal 17 Desember 2024 saya kemudian berkunjung ke rumah Ibu Etik yang merupakan salah satu pengeurus kesenian di desa wisata Tembi, wawancara bersama ibu Etik banyak membahas tentang kegiatan kesenian yang ditampilkan apabila ada tamu yang berkunjung, berikut adalah rangkuman wawancara saya dan ibu Etik.

“Berbagai kesenian menjadi bagian dari atraksi wisata di Desa Wisata Tembi, seperti karawitan, gejuk lesung, jathilan, serta pertunjukan musik dan tari. Namun, tidak semua kelompok seni di desa ini terafiliasi dengan pengelolaan desa wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Salah satu contohnya adalah pengrajin batik yang memilih untuk tetap mandiri. Padahal, jika terjalin kerja sama yang lebih erat antara berbagai kelompok seni dengan pengelola desa wisata, manfaat yang diperoleh bisa lebih luas dan merata. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dilakukan melalui kepengurusan khusus yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kegiatan. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya keterlibatan generasi muda. Meskipun banyak dari mereka memiliki minat terhadap seni dan budaya, kurangnya dorongan dari pihak yang dapat membimbing serta mengajak mereka untuk berpartisipasi menjadi hambatan utama. Jika ada upaya yang lebih aktif dalam melibatkan mereka, kemungkinan besar generasi muda akan lebih berperan dalam pelestarian budaya dan kesenian desa. Dukungan dari pemerintah kalurahan dalam bentuk dorongan serta pelatihan bagi masyarakat dalam

pengelolaan desa wisata masih tergolong terbatas. Sebagian besar kegiatan desa wisata berjalan atas inisiatif masyarakat Tembi sendiri. Jika pemerintah dapat memberikan dukungan secara rutin dan lebih intensif, maka hal ini berpotensi meningkatkan pengalaman serta keterampilan masyarakat, sekaligus memperkuat keberlanjutan desa wisata. Dari segi ekonomi, desa wisata memberikan manfaat yang cukup besar, terutama bagi pemilik homestay yang mendapatkan penghasilan tambahan dari wisatawan yang menginap. Sementara itu, kegiatan seni dan budaya mungkin tidak memberikan keuntungan sebesar sektor lainnya, tetapi keberadaannya tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kelestarian tradisi serta daya tarik wisata Desa Tembi.”



Gambar kesenian yang ada di desa wisata Tembi.

Narasumber terakhir yang saya wawancara adalah pak Tatang wibowo, beliau adalah pemilik workshop batik Ganesha dan sekaligus juga menjabat sebagai ketua paguyuban masyarakat di padukuhan Tembi, bersama pak Tatang saya mendapatkan banyak informasi mengenai pemberdayaan

masyarakat sadar wisata di Desa wisata Tembi, berikut adalah rangkuman wawancara yang kami lakukan.

“Salah satu bentuk ekonomi kreatif yang berkembang di Desa Wisata Tembi adalah usaha Ganesha Batik, yang menawarkan berbagai produk seni berbasis batik, seperti lukisan batik dan karya seni dengan teknik serupa. Selain itu, masyarakat sekitar juga mengembangkan usaha batik ecoprint, budidaya ternak lele, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal tenaga kerja, pegawai di Ganesha Batik berasal dari dalam maupun luar Padukuhan Tembi. Hal ini dikarenakan membatik memerlukan keterampilan khusus yang tidak semua orang bisa kuasai. Sejak tahun 1980-an, telah dilakukan berbagai pelatihan membatik bagi masyarakat setempat, namun sulit bagi mereka untuk menguasai teknik tersebut karena tidak memiliki latar belakang historis dalam bidang batik. Oleh karena itu, ecoprint menjadi alternatif yang lebih berkembang, karena tekniknya lebih mudah dipelajari oleh masyarakat. Dalam pengembangan usaha ecoprint, peran pemerintah tidak terlalu dominan, karena usaha ini telah berkembang secara mandiri. Pemerintah umumnya baru memberikan perhatian setelah usaha tersebut mulai dikenal luas. Meskipun seharusnya ada dukungan dari pemerintah, para pelaku usaha di Tembi tidak terlalu bergantung pada intervensi pemerintah, terutama dalam hal pemasaran. Promosi usaha ecoprint lebih banyak terbantu oleh mahasiswa KKN yang memperkenalkannya melalui media sosial. Adapun bentuk dukungan pemerintah yang ada lebih banyak berupa penyediaan lahan untuk tempat penjualan. Untuk meningkatkan daya saing, inovasi dalam batik dan ecoprint terus dikembangkan agar tetap relevan dengan tren dan permintaan pasar. Teknik yang digunakan pun terus mengalami pembaruan. Meskipun pemerintah kalurahan menyediakan pelatihan, banyak pelaku usaha menilai bahwa materi yang diberikan masih kurang bervariasi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih mencari informasi dan inovasi secara mandiri di luar daerah. Sejak awal, pengembangan ekonomi kreatif di desa ini mengandalkan pendekatan berbasis kemandirian, termasuk dalam sektor pembibitan ikan, produksi kain ecoprint, serta pemanfaatan pekarangan untuk pertanian. Semua kegiatan ini dilakukan dengan modal sendiri, termasuk melalui sistem jimpitan atau iuran sukarela yang dikelola oleh masyarakat setempat.”



Gambar kerajinan batik, gerabah dan pandan.

Berdasarkan peraturan kalurahan Timbulharjo nomor 7 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKAL) kalurahan Timbulharjo tahun anggaran 2024, pendapatan asli desa (PAD) kalurahan Timbulharjo adalah sebesar Rp.600.000.00, pendapatan transfer sebesar Rp. 5.647.054.767 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp.14.011.611, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mendapatkan anggaran paling besar yaitu sebesar Rp. 3.679.123.526 dan yang terkecil adalah bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.183.740.920. Bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.745.090 yang dibagi menjadi beberapa sub-sub bidang di antaranya adalah sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), sementara pemberdayaan masyarakat sadar wisata belum termasuk dalam bidang ataupun sub-sub bidang pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, yakni dengan membangun atau mengubah struktur serta lembaga agar dapat menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan kedua melibatkan aksi sosial dan politik, yang dilaksanakan melalui perjuangan politik serta gerakan untuk membangun kekuasaan yang efektif. Sedangkan pendekatan ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, yang dilakukan dengan menyelenggarakan proses pendidikan secara menyeluruh untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk membekali masyarakat lapisan bawah agar dapat meningkatkan kapasitas dan kekuatan mereka dalam menentukan arah kehidupan. Pendekatan pemberdayaan jimi dan penerapannya dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata Tembi. (1). Pendekatan pertama adalah pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten Timbulharjo sudah menjalankan beberapa program, namun dalam tahap perencanaan program tersebut masyarakat sadar wisata belum diikuti sertakan sehingga belum ada program pemberdayaan masyarakat yang dikhususkan untuk desa wisata, selain itu dalam hal alokasi dana sesuai dengan APBD, kabupaten Timbulharjo sudah memberikan dana untuk program pemberdayaan masyarakat, namun dalam bidang pemberdayaan masyarakat sadar wisata

belum ada dana yang di alokasikan. (2). Melibatkan aksi sosial dan politik. Pemerintah kalurahan Timbulharjo memang sudah menyediakan pasar kuliner untuk dijadikan tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat desa wisata, namun tempat tersebut juga belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat, diharapkan selain menyediakan lahan, pemerintah kalurahan juga ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan dan memeloporinya seperti contohnya adalah membuat sebuah acara atau event tentang desa wisata dengan melibatkan sebuah masyarakat sadar wisata, dengan event tersebut masyarakat bukan hanya dibantu dengan penyediaan lahan tapi juga bis dibantu dalam hal promsi dan pemasaran. (3). Pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran. Program pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam upaya pengembangan desa wisata dinilai terlalu monoton yang menyebabkan masyarakat lebih suka mencari ide atau inovasi di tempat lain di luar kalurahan, diharapkan sebelum memberikan program pemberdayaan pemerintah bisa melakukan riset untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa wisata.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan saya menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata memiliki strategi peningkatan keamanan, pelayanan ramah, serta promosi digital. Tembi dijadikan model pengembangan wisata bagi padukuhan lain dan menjadi bagian dari program Gabusan Manding Tembi (GMT) untuk memperkuat ekosistem wisata melalui keterlibatan masyarakat. Pemerintah juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat, seperti pendirian pasar kuliner, penyewaan tanah desa untuk wisata, serta pengelolaan sampah. Selama pandemi, masyarakat didorong mengelola ternak lele dan produksi batik ecoprint sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas.

Namun, dalam RPJMKAL, desa wisata bukan program prioritas, sehingga tidak ada alokasi dana khusus dalam APBKAL untuk pelaksanaannya. Dan berdasarkan temuan saya yang menunjukkan bahwa dalam hal pemberdayaan masyarakat sadar wisata Pemerintah telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat sadar wisata di Desa Wisata Tembi, tetapi masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Masyarakat menilai kontribusi pemerintah masih terbatas, dan program yang diberikan terkesan monoton, sehingga mereka mencari pelatihan dan inovasi dari pihak lain. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam RPJM-

Kalurahan Timbulharjo, pemberdayaan masyarakat sadar wisata tidak termasuk dalam visi-misi atau program prioritas. Anggaran pemberdayaan tahun 2024 sebesar Rp. 200.745.090 dialokasikan untuk sektor lain seperti pertanian, peternakan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta UMKM, tanpa alokasi khusus untuk desa wisata.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Tembi.

Pemerintah perlu mendukung desa wisata Tembi melalui kebijakan yang mencakup penyelenggaraan event sebagai sarana promosi. Selain itu, pemerintah harus berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan desa wisata bersama masyarakat. Event ini tidak hanya mengenalkan desa wisata, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk beraktivitas wisata dan memasarkan kerajinan mereka. Selain itu, desa wisata diharapkan menjadi program kerja pemerintah kalurahan dengan alokasi dana khusus.

Program-program pemerintah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan menghadirkan narasumber yang dapat memberikan pemahaman, wawasan, serta ide-ide inovatif. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat sadar wisata diharapkan menjadi

bagian dari program kerja pemerintah dengan dukungan dana yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang dan peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Undang-undang No 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisata*.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 *tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan*

Peraturan kalurahan Timbulharjo no 07 tahun 2001 *Tentang rencana pembangunan jangka menengah kalurahan (rpjm-kalurahan) kalurahan timbulharjo kapanewon sewon kabupaten bantul tahun 2020-2026*

Peraturan kalurahan Timbulharjo nomor 7 tahun 2023 *tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (apbkal) kalurahan timbulharjo tahun anggaran 2024*

Peraturan kalurahan timbulharjo nomor 7 tahun 2023 *Tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (apbkal) kalurahan timbulharjo tahun anggaran 2024*

Artikel dari internet

Welcome selamat datang sugeng rawung, profil kepariwisataan desa wisata Tembi Asana. 2024 Pendekatan top-down vs bottom Apabedanya?
<https://asana.com/id/resources/top-down-approach>

Sadli. 2022 Pendekatan Bottom Up, PPM Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 Kembali Digulirkan. <https://cimahikota.go.id/berita/detail/81811-pendekatan-bottom-up,-ppm-kota-cimahi-tahun-anggaran-2022-kembali-digulirkan>

Wonosaripegandon. 2022 Apa itu Desa Wisata dan Bagaimana Konsep Pengembangannya?.
<https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2krcDZXQT09/apa-itu-desa-wisata-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya-.html>.

Artikel dalam jurnal

Munawaroh, S., & Hendrastomo, G. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kampung Anggur Plumbungan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 118-128.

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380.

Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881-894.

Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118- 140.

Pangestu, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Wisata Kampoeng Purba Kelurahan Brangkal, Gemolong, Sragen. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(1), 87-93.

HERDAYANI, F., & Supardi, S. (2021). Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *WIYATA PRAJA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 23-31.

Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal pada desa wisata “Kampung Kokolaka” kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 93-103.

Maâ, B., Syakdiah, S., & Anggraini, O. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Dusun Plempoh, Desa Bokoharjo, Kecamatan

Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. *POPULIKA*, 7(1), 50-65.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

A. Strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pelaksanaan Desa wisata

1. Bagaimana strategi pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam pelaksanaan desa wisata?
2. Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan desa wisata Tembi?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program desa wisata ini?
Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan?
4. Apa sajah tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa wisata Tembi?
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan desa wisata Tembi?
6. Apa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat jika terlibat aktif dalam pelaksanaan desa wisata?
7. Bagaimana desa wisata Tembi dapat menjadi salah satu program khusus dari pemerintah desa untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di kalurahan Timbulharjo?

8. Bagaimana pelaksanaan desa wisata Tembi ini, sudahkah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?
9. Bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan program desa wisata?. Apakah ada pro dan kontra di antara masyarakat?
10. Apa saja program pemberdayaan yang telah diterapkan oleh pemerintah kalurahan Timbulharjo dalam upaya pembangunan desa wisata?

B. Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dalam desa wisata

1. Bagaimana interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan desa wisata Tembi?
2. Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata Tembi?
4. Apa alasan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata cenderung tidak aktif?
5. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat dari program ini? Apakah ada peningkatan ekonomi, lapangan kerja, atau pelestarian budaya?
6. Bagaimana proses pelaksanaan dan pemberdayaan desa wisata Tembi ini, sudahkah memenuhi harapan masyarakat.?

RINGKASAN DATA

SUMBER DATA	CARA DAN TAHAPAN PENGUMPULAN DATA	SASARAN	MANFAAT DALAM PENELITIAN
WAWANCARA	<ol style="list-style-type: none"> melakukan pendekatan terhadap informan di mana data akan dikumpulkan. Merumuskan dan menyusun pertanyaan yang sudah disiapkan dalam panduan wawancara. Mencatat dan merekam hasil wawancara yang di dapatkan. 	<p>Sasaran wawancara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah kalurahan Timbulharjo. Ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai lembaga pengembangan desa wisata Tembi. Masyarakat desa wisata Tembi 	Mendapatkan informasi secara langsung untuk menjelaskan suatu hal atau kondisi tertentu, serta mengumpulkan data terkait topik penelitian
DOKUMENTAS I	<ol style="list-style-type: none"> Meminta dokumen peningkatan ekonomi masyarakat. Meminta data usaha masyarakat di sekitar desa wisata seperti homestay,warung,dll . Foto tempat wisata desa wisata Tembi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah kalurahan Timbulharjo. Ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai lembaga pengembangan desa wisata Tembi. 	Untuk menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen.
OBSERVASI	Melakukan pengamatan dan mencatat kondisi objek secara cermat secara langsung	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi peneltian: Desa wisata Tembi kalurahan Timbulharjo. Pemerintah kalurahan Timbulharjo, kelompok sadar wisata (POKDARWIS), masyarakat desa wisata Tembi 	Mendapatkan pemahaman awal mengenai situasi di lokasi penelitian sebelum melakukan wawancara.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto penelitian dengan sekretaris kalurahan Timbulharjo, pada tanggal 08, Januari 2025 di kantor kaluran Timbulharjo



Foto penelitian dengan dukuh Tembi pada tanggal 06, Januari 2025 di rumah pak dukuh



Foto penelitian dengan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMKAL) kalurahan Timbulharjo pada tanggal 11, Januari 2025 di rumah pak Hatta



Foto penelitian dengan pemilik workshop batik pada tanggal 20, Januari 2025 di Ganesha batik Tembi

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-
KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021-2026.**

PROGRAM KERJA

- A. Bidang pemerintahan
 - 1. Pembenahan aparatur pemerintah desa
 - 2. Transparansi keuangan
 - 3. Sinergisitas dengan BPD
 - 4. Peningkatan pelayanan publik
- B. Bidang Pembangunan
 - 1. Membangun akhlaq
 - 2. Pembangunan fisik
- C. Bidang Pertanian
 - 1. Berfungsinya kelompok tani
 - 2. Terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui koperasi
- D. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan meliputi
 - 1. Mengoptimalkan kinerja RT
 - 2. Pembinaan PKK
 - 3. Memfungsikan LPMD
 - 4. Memfungsikan BUMDES

PROGRAM PRIORITAS

1. Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) melalui kegiatan musyawarah dusun. Musyawarah Desa dan Musrenbangdes secara partisipatif dengan melibatkan sebanyak-banyaknya unsur masyarakat desa;
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pembinaan remaja masjid, pengajian keliling bersama, menyelenggarakan MTQ tingkat desa dan perayaan hari-hari besar agama;
3. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa setiap tahun kepada masyarakat desa;
4. Membangun Sistem Informasi Desa (SID), yaitu sistem layanan online untuk:
 - a. Melaksanakan Simpati (Sistem 90 Detik) untuk pelayanan administrasi umum
 - b. Layanan pengaduan masyarakat
 - c. Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah desa
 - d. Layanan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa selama 24 jam setiap hariMembangun dan memelihara infrastruktur jalan desa, posyandu dan lain- lain secara berkualitas (tidak asal-asalan);
5. Pencegahan Stunting dengan optimalisasi 5 (lima) paket dasar layanan yaitu: Kesehatan Ibu & Anak, Konseling Gizi Terpadu, Perlindungan Sosial, Pelayanan PAUD, Sanitasi dan Air Bersih;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan PAUD melalui penyelenggaraan Diklat Pendidikan Dasar (Diklatsar) dan Lanjutan Guru PAUD dan bantuan sarana/prasarana;
7. Revitalisasi Posyandu, peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan kapasitas kader pengelolanya;
8. Penguatan kelembagaan dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
9. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) untuk pelaku usaha disektor pertanian, perikanan modern, peternakan, perdagangan, Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), ekonomi kreatif, dan sektor jasa;

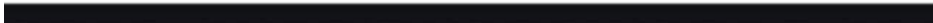
10. Pembangunan sarana prasarana olahraga dan pengelolaannya bersinergi dengan Karang Taruna Desa;
11. Meningkatkan kesejahteraan Kaum Rois, Ustadz , Ketua RT , Kader PKK, Posyandu dan kegiatannya;
12. Gerakan memilah sampah menjadi berkah dan pembangunan bank sampah

PERKAL NO 7 TAHUN 2024 TENTANG APBKAL KALURAHAN TIMBULHARJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024				
Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	600,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,647,054,767.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14,011,611.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,261,066,378.00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3,679,123,526.06</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,417,416,543.00	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,480,000.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	923,685,000.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60,789,936.00	ADD,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	343,354,648.00	ADD, PAD, PBK,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	147,660,000.00	ADD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21,848,084.00	ADD,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,000,000.00	ADD, PAD,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	56,435,000.00	DDS,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	129,471,800.00	PBH,
	1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	149,955,000.00	PAD,
	1.1.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	87,641,875.00	PAD,
	1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	45,980,000.00	ADD,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	129,115,200.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	243,000,000.00	PBH,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	388,768,429.06	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102,386,363.06	ADD, PBH,
	1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	286,382,066.00	DDS, PBK, SDD,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	195,550,000.00	
	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	132,250,000.00	DDS,
	1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	61,500,000.00	DDS,
	1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	1,800,000.00	DDS,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	264,445,000.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,030,000.00	ADD,
	1.4.02.	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Mudus, rembug desa Non Reguler)	22,090,000.00	ADD, PBH,
	1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16,075,000.00	ADD,
	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15,075,000.00	ADD,
	1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	23,775,000.00	ADD,
	1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5,525,000.00	ADD,
	1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21,750,000.00	DDS,
	1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorir	78,425,000.00	ADD,

1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	15,000,000.00	DDS, SDD ,
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	58,700,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	412,943,554.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	90,100,000.00	PAD, PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	20,500,000.00	ADD,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	44,000,000.00	PBH,
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian	258,343,554.00	PAD, PBH,
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	2,064,291,982.00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	327,629,824.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	167,655,000.00	BMP,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24,745,000.00	DDS,
2.1.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9,785,874.00	DDS, SDD ,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	93,443,950.00	SDD ,
2.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	32,000,000.00	BMP,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	591,940,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	320,530,000.00	BMP, DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	164,790,000.00	DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7,400,000.00	DDS,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,300,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	6,250,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	58,780,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	13,890,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	10,000,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472,456,600.00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	207,954,440.00	DDS, PBK, SDD ,
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	64,502,160.00	DDS, SDD ,
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200,000,000.00	DDS, PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	80,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,000,000.00	DDS,
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30,000,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	332,265,558.00	
2.5.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	21,810,558.00	SDD ,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	9,350,000.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	301,105,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	260,000,000.00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	0.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	0.00	DDS,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	629,673,812.04	

3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	134,635,000.00	
3.1.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11,400,000.00	PBH,
3.1.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	84,395,000.00	DDS, PBH,
3.1.92.		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	32,600,000.00	DDS,
3.1.95.		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	6,240,000.00	DDS,
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	304,926,812.04	
3.2.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	33,900,000.00	DDS,
3.2.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	131,566,812.04	ADD, DDS, DLL, PBH,
3.2.90.		Pembinaan Bidang Keagamaan	135,860,000.00	DDS, PBH, SDO,
3.2.92.		Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	3,600,000.00	PAD,
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42,657,000.00	
3.3.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	0.00	DDS,
3.3.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	36,407,000.00	DDS,
3.3.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,250,000.00	ADD,
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	147,455,000.00	
3.4.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9,000,000.00	DDS,
3.4.03.		Pembinaan PKK	135,455,000.00	DDS,
3.4.93.		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	3,000,000.00	DDS,
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	200,745,090.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133,617,590.00	
4.2.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tensier/Sederhana	8,000,000.00	DDS,
4.2.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	55,545,090.00	DDS, SDO,
4.2.90.		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	65,937,500.00	DDS,
4.2.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4,135,000.00	DDS,
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17,415,000.00	
4.4.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,000,000.00	DDS,
4.4.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7,750,000.00	DDS,
4.4.90.		Pendataan Penyandang Disabilitas	3,050,000.00	DDS,
4.4.91.		Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3,615,000.00	DDS,
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16,362,500.00	
4.5.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16,362,500.00	ADD, BMP, PBH,
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000.00	
4.6.91.		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	5,000,000.00	DDS,
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	28,350,000.00	
4.7.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	28,350,000.00	DDS,
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	183,740,920.00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	
5.1.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	DDS,
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1,000,000.00	



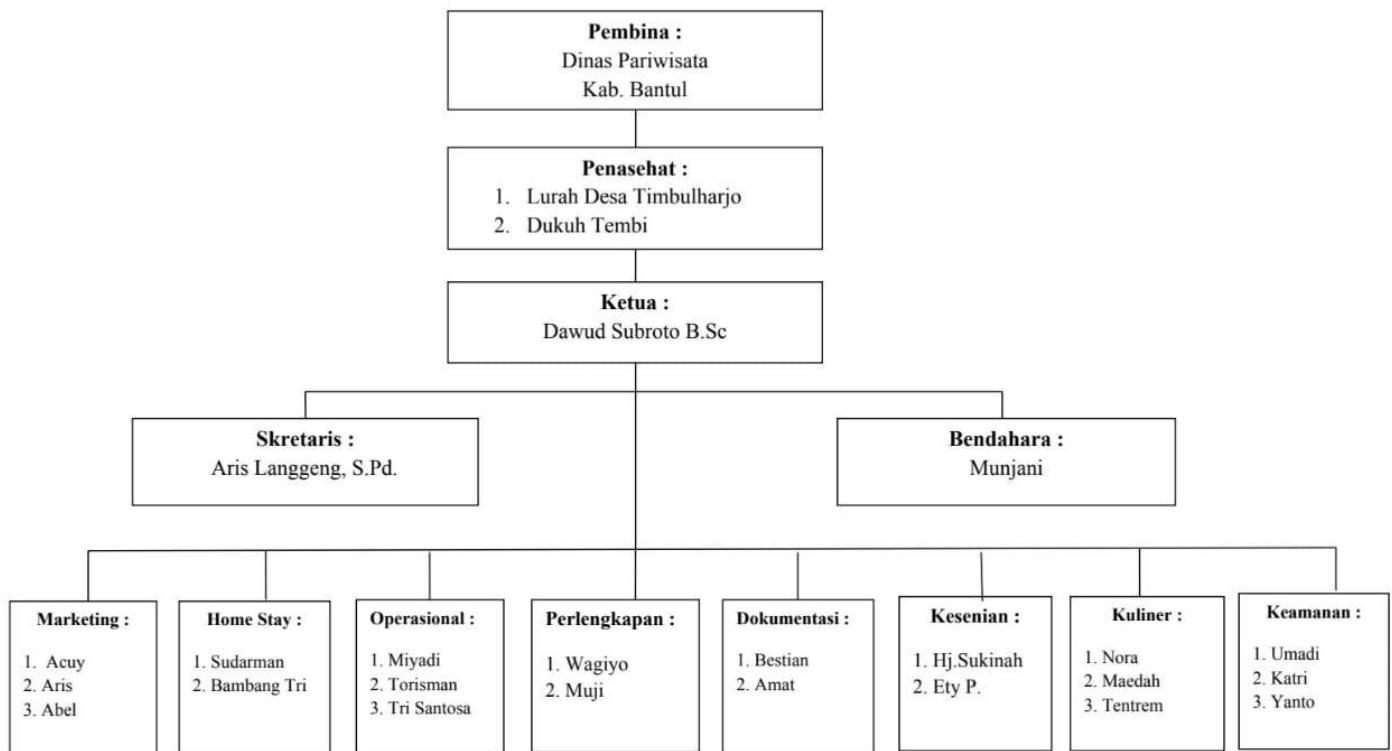
5.2.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1,000,000.00	DDS,
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180,000,000.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180,000,000.00	DDS,
		JUMLAH BELANJA	6,757,575,330.10	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(496,508,952.10)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	496,508,952.10	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	496,508,952.10	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0.00)	

Timbulahrjo, 19 July 2024

Lurah,

Anif Arkham Halbar, S.Pd

STRUKTUR KEPENGURUSAN DESA WISATA TEMBI





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SERALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SERALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SERALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 867/II/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Samuel Arifandri Salem
No Mhs : 20520054
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Tembi Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Desa Wisata Tembi Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 November 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

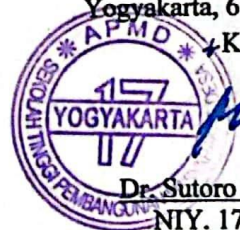
SURAT TUGAS
Nomor : 425/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Samuel Arifandri Salem
Nomor Mahasiswa : 20520054
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Wisata Tembi Kalurahan Timbulharjo,
Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Wisata Tembi Kalurahan
Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 November 2024

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NTY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Nama : Samuel Arifandri Salem
 NIM : 20520054
 Jurusan Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
 Lokasi : Desa Wisata Tembi, Kalurahan Timbulharjo
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan

Pemerintah Kalurahan Timbulharjo memberikan izin kepada yang tersebut di atas untuk melaksanakan kegiatan (jin Penelitian).

dan ketentuan sebagai berikut :

wajib menjaga ketertiban dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku,
 izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan,
 izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,
 memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan,
 ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Timbulharjo, 11-12-2024
 Kalurahan Timbulharjo



MUHAMAD SAWABI, S.Pd. 1
 KAMITUWA

sampaikan kepada Yth.
 Tembi